

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya	4
1.5 Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKD Kota Magelang	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	39
4.2 Strategi dan Kebijakan	45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	72
BAB VII PENUTUP	73
7.1 Program Transisi	73
7.2 Kaidah Pelaksanaan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya	4
Gambar 2.1	SOT DPPKD	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian menurut Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin	13
Tabel 2.2	Susunan Kepegawaian menurut Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.3	Jumlah Personil Yang Akan Memasuki Purna Tugas Tahun 2016-2021	14
Tabel 2.4	Sarana Prasarana DPPKD Kota Magelang.....	15
Tabel 2.5	Perkembangan APBD DPPKD Kota Magelang Tahun 2011-2015	19
Tabel 2.6	Perkembangan Realisasi APBD DPPKD Kota Magelang Tahun 2011-2015	20
Tabel 2.7	Anggaran Pendapatan yang dikelola DPPKD Tahun 2011-2015.....	20
Tabel 2.8	Blj Tidak Langsung, Blj Tidak Terduga dan Blj Pembiayaan 2011-2015	21
Tabel 2.9	Tingkat Pencapaian Misi DPPKD Tahun 2011-2015	23
Tabel 2.10	Target Renstra, Realisasi Capaian & Rasio Capaian DPPKD 2011-2015	24
Tabel 2.11	Rasio Target dan Realisasi PAD Thd APBD Kota Magelang 2011-2015	27
Tabel 2.12	Tingkat Pencapaian Misi DPPKD Tahun 2011-2015	
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan DPPKD Kota Magelang dengan Prioritas Dirjen Keuangan Daerah, Biro Keu Setda Provinsi Jawa Tengah dan DPPAD Provinsi Jawa Tengah	36
Tabel 4.1	Target PAD Kota Magelang Tahun 2016-2021	39
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra DPPKD 2016-2021	40
Tabel 4.3	Faktor Eksternal dan Internal, Alternatif Strategi pada DPPKD Tahun 2016-2021	48
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Renstra DPPKD 2016-2021	50
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada DPPKD Kota Magelang	57
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Awal Periode RPJMD dan Target Capaian 5 Tahun Mendatang	72
Tabel 7.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPPKD Tahun 2022	73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka daerah harus mampu untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi yang dimiliki sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas dapat tercapai. Untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana didasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistim Pemerintahan Daerah. Dengan kondisi tersebut, daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih profesional baik dalam sumber daya manusia maupun dalam sistem perencanaan. Oleh karena itu Rencana Strategis (renstra) sebagai perencanaan strategis menjadi sangat penting keberadaannya terutama di dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah melalui perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Semua perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang berkewajiban membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai dasar penyusunan. Selain berpedoman pada RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, Rencana Strategis juga tidak lepas dari Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasar pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sehingga Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah harus dirubah menjadi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perubahan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pedoman bagi perangkat daerah baru yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 sesuai dengan kewenangan.

Adapun proses perubahan renstra, sebagaimana Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 050/050/310 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 tanggal 23 Januari 2017, secara garis besar dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra OPD,
Dalam persiapan penyusunan perubahan renstra OPD hal-hal yang dilakukan adalah menyiapkan data dan informasi serta menyiapkan rancangan renstra.
2. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD,
Rancangan perubahan renstra OPD disusun dengan mengacu pada RPJM-D dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2016-2021 serta diselaraskan melalui forum OPD.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD,
Rancangan akhir perubahan renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan renstra OPD (point 2) yang telah melalui verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Penetapan Perubahan Renstra OPD.
Penetapan perubahan renstra OPD melalui Keputusan Kepala OPD, setelah sebelumnya dilakukan pengesahan perubahan renstra OPD melalui Keputusan Kepala Daerah.

Selanjutnya secara substansi perubahan renstra ini tetap mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya dalam hal pencapaian atas Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Bab V RPJMD dan indikator kinerja program sebagaimana tercantum dalam bab VII RPJMD, yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang juga harus sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Rencana Strategis Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1.B.1. Maksud

Perubahan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan perangkat daerah.

Memberikan gambaran kondisi saat ini sampai dengan berakhirnya masa renstra (tahun 2021) serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

1.B.2. Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan.

Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan berdasarkan kewenangan perangkat daerah yang dijabarkan dari visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016–2021.

Sebagai dasar dalam menyusun program strategis sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.

Sebagai bahan penyusunan evaluasi kinerja.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

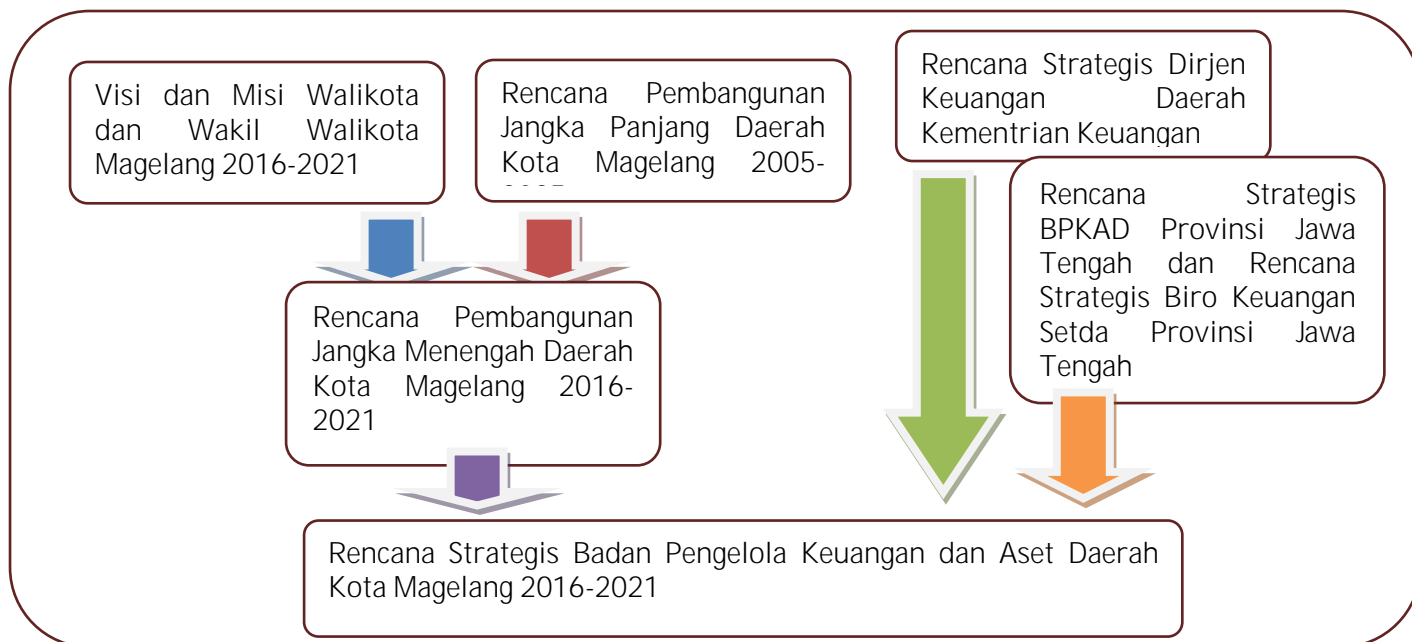
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

D. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Lainnya

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasar RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang berisi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2016-2021 serta mengacu pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



E. Sistematika

- Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan renstra dengan dokumen lainnya serta sistematika penulisan;
- Bab II Gambaran pelayanan perangkat daerah memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan perangkat daerah;
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

- Bab IV Penjabaran Visi, Misi kepala daerah yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, Tujuan, Strategi dan Kebijakan. Tujuan merupakan penjabaran visi Misi kepala daerah yang sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih spesifik dan terukur dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh perangkat daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- Bab V Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- Bab VI Memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- Bab V Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKAD
KOTA MAGELANG

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasar Perda tersebut telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD pada dasarnya mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penambahan fungsi pengelolaan barang milik daerah. Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar tugas tersebut maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Adapun untuk lebih jelasnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD berdasar Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016, digambarkan sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi

Sebagaimana ketentuan Pasal 3, BPKAD terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan;
 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
- d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- e. Bidang Pembelian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung;
 3. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Akuntansi;
 2. Sub Bidang Analisa Laporan;
 3. Sub Bidang Pelaporan.
- g. Bidang Aset, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bidang Pendayagunaan Aset.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4, bahwa :

- a. Sekretariat pada BPKAD dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- b. Bidang pada BPKAD dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- c. Sub Bagian pada Sekretariat di BPKAD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- d. Sub Bidang pada Bidang di BPKAD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana ketentuan Pasal 5, tugas dan fungsi BPKAD adalah :

- a. BPKAD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Penjabaran tugas dan fungsi BPKAD sebagaimana Lapidan II adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala BPKAD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala BPKAD mempunyai fungsi :

- Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Kepala Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam Bidang Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pendapatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pendapatan dibantu 3 Sub Bidang, yaitu :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan.
- c. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

d. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam Bidang Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dibantu 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
- b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

e. Kepala Bidang Pembelian

Kepala Bidang Pembelian mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam Bidang Pembelian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pembelian mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembelian.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembelian.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembelian.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pembelian

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pembelanjaan dibantu 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
- b. Sub Bidang Belanja Langsung
- c. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan

f. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam bidang akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Akuntansi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi dibantu 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pengembangan Akuntansi
- b. Sub Bidang Analisa Laporan
- c. Sub Bidang Pelaporan

g. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala BPKAD dalam bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Aset.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Aset.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Aset dibantu 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
- c. Sub Bidang Pendayagunaan Aset

Selain Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Begitu pula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, juga menjalankan fungsi tersebut. Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Barang yaitu kepala Perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2016 adalah :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. menyusun laporan keuangan daerah;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, PPKD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah
- f. menetapkan Surat Penyediaan dana (SPD)
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- i. menyajikan informasi keuangan daerah
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- k. menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD;
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, wewenang dan tanggung jawab Kepala BPKAD adalah :

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah);
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang

- tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

Adapun Bagan Organisasi BPKAD Kota Magelang dapat digambarkan sebagai berikut :

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki BPKAD Kota Magelang sebagai organisasi pemerintah yang merupakan unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dikategorikan dalam 3 hal, yaitu sumber daya manusia/personil, sarana dan prasarana serta sumber dana/anggaran.

1. Sumber daya manusia/personil

Sumber daya manusia/personil bulan Januari 2017 berjumlah 68 orang, terdiri dari laki-laki 35 orang dan perempuan 33 orang. Adapun susunan kepegawaian menurut jabatan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian menurut Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

POSISI	Jenis Pendidikan																JML
	S3		S2		S1		D4		D3		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b			1														1
Eselon III/a			1														1
Eselon III/b			2	1	1	1											5
Eselon IV/a					2	15											17
Eselon IV/b																	
Fungsiona I																	
Staf Pelaksana					6	3			6	3	11	9	3		2		43
Jml			4	1	9	20			6	3	11	9	3		2		68

Sumber: BPKAD Kota Magelang per Januari 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat komposisi personil BPKAD Kota Magelang berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu:

- Jenjang pendidikan S2 sebanyak 5 orang atau 7,35%
- Jenjang pendidikan S1 sebanyak 29 orang atau 42,65%
- Jenjang pendidikan D4 sebanyak 1 orang 1,47%
- Jenjang pendidikan D3 sebanyak 9 orang atau 13,24%
- Jenjang pendidikan SLTA sebanyak 20 orang atau 29,41%
- Jenjang pendidikan SLTP sebanyak 3 orang atau 4,41%
- Jenjang pendidikan SD sebanyak 2 orang atau 2,94%

Apabila dilihat dari prosentase menurut jenjang pendidikan tersebut, maka personil BPKAD didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 42,65%. dengan komposisi Aparatur Sipil Negara yang didominasi tingkat pendidikan S1, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD , dimana tingkat kompleksitas jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan cukup tinggi sehingga dituntut dan dibutuhkan personil dengan tingkat pendidikan yang memadai.

Selanjutnya rekapitulasi personil menurut golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian menurut Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

POSISI	Jenis Pendidikan																JML
	S3		S2		S1		D4		D3		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV			2	1	1	1											4
Gol III			2		8	19			2	1	2	4					38
Gol II									4	2	9	5	3			1	24
Gol I													1			1	2
Jml			4	1	9	20			6	3	11	9	4			2	68

Sumber: BPKAD Kota Magelang per Januari 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat komposisi personil di BPKAD Kota Magelang berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh perempuan. Hal ini dapat dimaklumi karena jenis pekerjaan dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan ketelitian dan kesabaran, dimana secara umum dimiliki oleh pegawai perempuan.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan masa kerja, personil BPKAD yang akan memasuki purna tugas dalam kurun waktu enam tahun kedepan, terhitung mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 16 orang. Secara terperinci personil yang memasuki purna tugas dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Personil yang akan Memasuki Purna Tugas
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Memasuki Purna Tugas	Ket.
1	2016	2	Ess :- Staf : 2
2	2017	4	Ess III :1 Staf : 3
3	2018	5	Ess :- Staf : 5
4	2019	2	Ess III : 1 Staf : 1
5	2020	-	Ess :- Staf : -
6	2021	3	Ess IV : 1 Staf : 2
	Jumlah	16	

Sumber: BPKAD Kota Magelang per Januari 2017

2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana kantor merupakan pendukung mutlak demi kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Sarana prasarana yang dimiliki BPKAD sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Sarana Prasarana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Genset	2	Unit	Baik
2	Pompa Air	5	Unit	4 Baik 1 Rusak
3	Mobil PickUp Roda 4	2	Unit	Baik
4	Mobil Toyota Roda 4/Sedan	1	Unit	Baik
5	Mobil Mini Bus ST Roda 4	6	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 2	52	Unit	Baik
7	GPS	2	Unit	Baik
8	Alat Ukur/Distometer	2	Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	6	Unit	Baik
10	Mesin Ketik Elektrik	3	Unit	Baik
11	Almari Besi 2 Pintu	2	Unit	Baik
12	Almari Arsip	11	Unit	Baik
13	Almari Sliding Kaca	20	Unit	Baik
14	Rak Buku	7	Unit	Baik
15	Rak Komputer Server	1	Unit	Baik
16	Rak Besi	4	Unit	Baik
17	Almari	3	Unit	Baik
18	Rak Resepsionis	3	Unit	Baik
19	Rak Arsip Buatan	48	Unit	Baik
20	Rak Arsip	29	Unit	Baik
21	Filling Cabinet	29	Unit	Baik
22	Brankas	1	Unit	Baik
23	Kardek	1	Unit	Baik
24	Almari Buku Kaca Sedang	2	Unit	Baik
25	Papan Data	4	Unit	Baik
26	Papan Data dan White Board	1	Unit	Baik
27	Papan Data 120cm x 240cm	2	Unit	Baik
28	Papan Stok/Visual	1	Unit	Baik
29	Papan informasi (SOTK)	1	Unit	Baik
30	Mesing Penghancur Kertas	6	Unit	3 Baik 3 Rusak
31	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
32	White Board	1	Unit	Baik
33	Mesin Perforator	1	Unit	Baik

34	LCD Projector	2	Unit	Baik
35	Proyektor Screen	2	Unit	Baik
36	Alat Validasi	1	Unit	Baik
37	Almari Kayu	4	Unit	Baik
38	Box Komputer Layanan	1	Unit	Baik
39	Rak Piring Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
40	Rak Piring Tak Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
41	Rak TV	1	Unit	Baik
42	Kursi Tunggu	5	Unit	Baik
43	Meja Kerja 1 Biro	5	Unit	Baik
44	Kursi Kerja Staf	27	Unit	Baik
45	Meja Kerja	4	Unit	Baik
46	Meja Kursi Putar	1	Unit	Baik
47	Meja Kursi Kerja	4	Unit	Baik
48	Meja Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
49	Meja Pelayanan	11	Unit	Baik
50	Meja Panjang	6	Unit	Baik
51	Meja Rapat Panjang	13	Unit	Baik
52	Kursi Tamu Busa	1	Unit	Baik
53	Meja Kursi Tamu	3	Unit	Baik
54	Kursi Putar	58	Unit	Baik
55	Kursi Kerja Putar	18	Unit	Baik
56	Kursi Hadap	8	Unit	Baik
57	Kursi Putar Petugas Pelayanan	5	Unit	Baik
58	Kursi Kayu	1	Unit	Baik
59	Kursi Putar Pimpinan	11	Unit	Baik
60	Kursi Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
61	Kursi Lipat	1	Unit	Rusak Berat
62	Meja Komputer	1	Unit	Rusak Berat
63	Meja kerja 1/2 Biro	10	Unit	Baik
64	Karpets	1	Unit	Rusak Berat
65	Karpets Motif	1	Unit	Baik
66	Karpets Polos	2	Unit	Baik
67	Karpets Pola	1	Unit	Baik
68	Karpets	1	Unit	Baik
69	Gordyn Vertical	1	Unit	Baik
70	Gordyn	1	Unit	Baik
71	Vacum Cleaner	2	Unit	Baik
72	Lemari Es	1	Unit	Baik
73	Air Conditioner (AC)	25	Unit	Baik
74	Kitchen Set	1	Unit	Baik
75	Televisi LED	4	Unit	Baik

76	Tape Teac	1	Unit	Rusak Berat
77	Sound System	3	Unit	Baik
78	Mixer Sound Yamaha	1	Unit	Baik
79	Mic Meja Wireles	4	Unit	Baik
80	Speaker Aktif EV	2	Unit	Baik
81	Wireless	1	Unit	Baik
82	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
83	Tangga Slorok	1	Unit	Baik
84	Tangga Besi	3	Unit	Baik
85	Dispenser	4	Unit	Baik
86	Kamera Handy Cam	1	Unit	Baik
87	Parabola	1	Unit	Baik
88	Kamera	2	Unit	Baik
89	Kamera Digital	5	Unit	Baik
90	Water Tower	1	Unit	Baik
91	Tabung Pemadam Api Ringan	10	Unit	Baik
92	Komputer Server	6	Unit	Baik
93	Jaringan Instalasi (LAN)	2	Jaringan	Baik
94	Komputer PC	71	Unit	Baik
95	Notebook	19	Unit	Baik
96	Laptop	26	Unit	Baik
97	Monitor	4	Unit	Baik
98	LCD Monitor	8	Unit	Baik
99	Printer All In One Inkjet	1	Unit	Baik
100	Printer All In One Laser	1	Unit	Baik
101	Printer Pita	5	Unit	Baik
102	Printer Tinta	22	Unit	Baik
103	Printer Doot Matrik	1	Unit	Baik
104	Printer Doot Matrik 24 PAIN LQ 2190	6	Unit	Baik
105	Printer Portable	1	Unit	Baik
106	Printer Inkjet Color	6	Unit	Baik
107	Printer Multi Fungsi	11	Unit	Baik
108	Printer Inkjet	8	Unit	Baik
109	Printer LaserJet	12	Unit	Baik
110	Printer LaserJet Colour	1	Unit	Baik
111	Printer	24	Unit	Baik
112	Scaner	2	Unit	Baik
113	Printer, Scanner, Fotocopy	2	Unit	Baik
114	Ethernet	1	Unit	Rusak Berat
115	Work Station	5	Unit	Rusak Berat
116	UPS	45	Unit	Baik

117	CD room	1	Unit	Rusak Berat
118	Mikrotik	1	Unit	Baik
119	Modem	1	Unit	Baik
120	Cisco Switch	1	Unit	Baik
121	D-link	1	Unit	Baik
122	Switch Hub	2	Unit	Baik
123	Ubiquiti Unifi Acces Point Long Range Series	2	Unit	Baik
124	Amplifier Mobil (AA 9500 TA)	1	Unit	Baik
125	Pengeras Suara	1	Unit	Baik
126	Jaringan PABX	1	Unit	Baik
127	Pswt Faksimiles	1	Unit	Baik
128	Kamera CCTV	1	Unit	Baik
129	Tralis Jendela	1	Unit	Baik
130	Sekat Ruangan	1	Unit	Baik
131	Kamar Mandi	1	Unit	Baik
132	Gedung Rumah Genset, Musholla, Kamar Mandi	1	Unit	Baik
133	Instalasi Air Bersih	1	Unit	Baik
134	Instalasi Air Kotor	1	Unit	Baik
135	Jaringan Instalasi Listrik	1	Unit	Baik
136	Router Broadbard	1	Unit	Baik
137	Switch manageable 8	1	Unit	Baik
138	Switch unmanageable gigabyte 8	1	Unit	Baik
	J U M L A H	872	unit	

Sumber: BPKAD Kota Magelang per Januari 2017

Apabila dilihat dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kerja di BPKAD sampai dengan saat ini secara umum dalam kondisi memadai. Namun demikian dalam waktu lima tahun ke depan masih dibutuhkan sarana prasarana lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sarana prasarana yang dimiliki BPKAD sebagai perangkat daerah/pengguna barang, terdapat barang yang dikuasai Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, yaitu sebagaimana Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah

3. Sumber Dana/Anggaran

Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Sebagai gambaran bagi BPKAD dalam merencanakan alokasi anggaran program dan kegiatan, tetap disajikan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Adapun gambaran besaran dana/anggaran yang dikelola selama kurun waktu 6 (enam) tahun disajikan dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan APBD DPPKD Kota Magelang
Tahun 2011-2016

No	Tahun	Anggaran			Pertumbuhan
		Belanja Tidak Langsung Rp	Belanja Langsung Rp	Total Rp	
1	2011	4.714.280.563	4.265.029.782	10.105.139.000	--
2	2012	5.087.003.756	6.040.822.503	13.645.023.000	35,03%
3	2013	4.816.933.610	6.920.553.718	14.046.862.000	2,95%
4	2014	5.381.361.505	8.382.831.395	15.845.191.000	12,80%
5	2015	5.491.472.827	8.787.610.642	17.137.165.000	8,15%
6	2016	6.712.610.000	11.543.891.000	18.265.501.000	6,58%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun sumber dana/anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah semakin meningkat. Dengan peningkatan cukup signifikan dari tahun 2011 sampai dengan akhir periode renstra yaitu tahun 2015 sebesar 41,03%.

Peningkatan anggaran tersebut sebagian besar berada pada anggaran belanja langsung. Artinya bahwa peningkatan anggaran ini digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan dalam rangka pelayanan kepada seluruh perangkat daerah terkait proses penganggaran, proses pencairan anggaran maupun pelaporan atas pelaksanaan APBD.

Tabel 2.5
Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah

NO	Spesifikasi Barang				Asal - Usul / Cara Perolehan Barang	Tahun Beli / Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Satuan	Kondisi (B, RR, RB)	Jumlah Akhir 31	Ket.
	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan						Jumlah Barang	Lain
1	GPS	Garmin Montana 650	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
2	GPS	Receiver GNSS Geodetik South S86	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
3	GPS	Receiver GNSS Geodetik South S86	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
4	Lemari Arsip	VIP 602	-	Besi	Pembelian	2015	-	Unit	B	3	-
5	Rak Arsip	6 Trap	-	Besi	Pembelian	2015	142x40x225	Unit	B	3	-
6	Rak Arsip	6 Trap	-	Besi	Pembelian	2016	142x40x225	Unit	B	2	-
7	Filling Kabinet	Brother	-	Besi	Pembelian	2010	4 laci	Unit	B	3	-
8	Brandkas	Daichiban	-	Baja	Pembelian	2010	4 laci	Unit	B	3	-
9	Mesin Penghancur Kertas	GBC 52CDX	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
10	LCD Projector	Infocus IN 1112a	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
11	Paper Holder	Uchida	-	-	Pembelian	1999	-	Unit	RB	1	Ex. Keu
12	Almari Kayu	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
13	Almari	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
14	Almari	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
15	Meja/Kursi 1/2 Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2002	-	Unit	B	2	dr Umum
16	Televisi	Sony 40R350B	-	Mika	Pembelian	2014	40"	Unit	B	1	-
17	Dispencer	Sanken	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	1	Ex. Panwaslu

18	Kamera	Benq, Panasonic	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	3	-
19	Kamera	Sony Alpha A6000	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
20	Komputer	Intel	-	Mika	Pembelian	2005	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
21	Komputer	Intel	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	KB	2	Ex. Keu
22	Komputer Intel Core 2 Duo (2 unit)	Intel Core 2 Duo	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	2	-
23	Komputer	Acer Aspire M1641	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	1	-
24	PC Unit	HP Pro MT 3340 MT	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	6	-
25	PC Unit	ASUS EeeTop 2013IUTI-B004C All-in-One	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	3	-
26	PC Unit	HP Envy Recline 27-K400d AIO	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
27	Notebook	Dell Inspiron 13z	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	2	-
28	Notebook	ASUS N46JV-VX3026	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
29	Notebook	Asus X450JN-WX022D	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
30	Notebook	Asus N550 JX-CN0087H	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
31	CPU	Titanic	-	Mika	Pembelian	1998	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
32	Monitor	GIC	-	Mika	Pembelian	2000	-	Unit	KB	2	Ex. Keu
33	Monitor Digital	CAVIAR	-	Mika	Pembelian	2005	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
34	Printer	Epson	-	Mika	Pembelian	1996	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
35	Printer	Hawlet Packard	-	Mika	Pembelian	1999	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
36	Printer	-	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	1	Ex. Panwaslu
37	Printer Dotmatrix	Epson LQ2190	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
38	Printer	Brother MFC-J200	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
39	Printer	HP Laserjet P1102W	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
40	Printer	HP Laserjet Pro 400 M401DN	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
41	Printer	Brother MFC-J200	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-

42	Printer	Brother MFC-J200	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	2	-
43	Scanner*	Canon 4200 F	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
44	UPS*	Prolink 600 VA	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
45	UPS	APC BR550GI	-	Besi	Pembelian	2012	550 VA	Unit	B	1	-
46	UPS	APC BR1500GI	-	Besi	Pembelian	2012	1500 VA	Unit	B	1	-
47	Server	HP Proliant ML110G7-337	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
48	Kursi Kerja Eselon IV	Indachi D660	-	Besi, Busa	Pembelian	2015	-	Unit	B	3	-
49	Handy Talkie	Alinco DJ-A10	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	4	-
50	Perpres No 70 Tahun 2012	-	-	Kertas	Pembelian	2012	-	Buah	B	1	-
51	PPRI No 71 Tahun 2010	CV Novindo Pustaka Mandiri	-	Kertas	Pembelian	2012	-	Buah	B	1	-
52	Perka LKPP No. 14/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan	Visi Media	-	Kertas	Pembelian	2013	-	Buah	B	1	-
53	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia	CV Eko Jaya	-	Kertas	Pembelian	2015	-	Buah	B	1	-
54	Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; PP	CV Cipta Jaya	-	Kertas	Pembelian	2015	-	Buah	B	1	-
55	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang	Citra Utama Media	-	Kertas	Pembelian	2015	-	Buah	B	1	-
56	Taman Makam Pahlawan	-	-	Kertas	Pembelian	2016	-	Buah	B	3	-
57	Makam Dumpoh	Jl. Jend. Gatot Subroto, sebelah TPU Giriloyo, Jurangombo Selatan	001	Tanah	Pembelian	2001	4290 m2	Bidang	B	1	SK Wali
58	Makam Kedungsari	Dumpoh, Potrobangsari	051	Tanah	Pembelian	2001	4500 m2	Bidang	B	1	SK Wali
59	Makam Kelurahan Magelang	Jl. Mahakam, Kedungsari	052	Tanah	Pembelian	2001	879 m2	Bidang	B	1	SK Wali
60	Makam Kp. Sentul	RT.02 RW.13, Magelang	061	Tanah	Pembelian	2001	6119 m2	Bidang	B	1	SK Wali
61	Makam Kuncen	Kp. Sentul, Kramat Selatan	035	Tanah	Pembelian	2001	1380 m2	Bidang	B	1	SK Wali
62	Makam Kyai Bogem	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kramat Selatan	002	Tanah	Pembelian	2001	8300 m2	Bidang	B	1	SK Wali
63	Makam Nambangan I	Dk. Bogeman Timur RT.02 RW.02, Panjang	023	Tanah	Pembelian	2001	99 m2	Bidang	B	1	SK Wali
64	Makam Nambangan II (Selatan)	Jl. Tlogowarno, Rejowinangun Utara	037	Tanah	Pembelian	2001	18700 m2	Bidang	B	1	SK Wali
65		Jl. Tlogowarno, Rejowinangun Utara	035	Tanah	Pembelian	2001	2550 m2	Bidang	B	1	SK Wali

66	Makam Ngembik Kidul	Ngembik Kidul, Kramat Selatan	003	Tanah	Pembelian	2001	2230 m2	Bidang	B	1	SK Wali
67	Makam Ngembik Lor	Ngembik Lor, Kramat Selatan	004	Tanah	Pembelian	2001	2450 m2	Bidang	B	1	SK Wali
68	Makam Nglarangan	Larangan, Potrobangsari	049	Tanah	Pembelian	2001	28180 m2	Bidang	B	1	SK Wali
69	Makam Paten	Utara Pustu Ngembik, Kramat Selatan	005	Tanah	Pembelian	2001	3170 m2	Bidang	B	1	SK Wali
70	Makam Prangkoan	Prangkoan Sanden, Kramat Selatan	032	Tanah	Pembelian	2001	1950 m2	Bidang	B	1	SK Wali
71	Makam Tuguran	Tuguran, sebelah SMP 11, Potrobangsari	050	Tanah	Pembelian	2001	3200 m2	Bidang	B	1	SK Wali
72	Makam Tulung	Tulung, Magelang, Magelang	053	Tanah	Pembelian	2001	1534 m2	Bidang	B	1	SK Wali
73	Taman Makam Bahagia	Makam Cemara 7, Kedungsari	048	Tanah	Pembelian	2001	661 m2	Bidang	B	1	SK Wali
74	Sawah	Ngembik Kidul, Kramat Selatan	019	Tanah	Pembelian	2001	1250 m2	Bidang	B	1	SK Wali
75	Sawah	Ngembik Kidul, Kramat Selatan	020	Tanah	Pembelian	2001	639 m2	Bidang	B	1	SK Wali
76	Sawah	Dk. Sanden, Kramat Selatan	022	Tanah	Pembelian	2001	1360 m2	Bidang	B	1	SK Wali
77	Sawah	Kp. Sidotopo, Kedungsari	024	Tanah	Pembelian	2001	3620 m2	Bidang	B	1	SK Wali
78	Sawah	Kp. Sidotopo, Kedungsari	025	Tanah	Pembelian	2001	565 m2	Bidang	B	1	SK Wali
79	Sawah	Kedungsari, Kedungsari	026	Tanah	Pembelian	2001	3110 m2	Bidang	B	1	SK Wali
80	Sawah	Jl. Ello Jetis Kedungsari, bawah SLBN, Kedungsari	028	Tanah	Pembelian	2001	598 m2	Bidang	B	1	SK Wali
81	Sawah	Jl. Ello Jetis Kedungsari, bawah SLBN, Kedungsari	029	Tanah	Pembelian	2001	848 m2	Bidang	B	1	SK Wali
82	Sawah	Jl. Pulomas, bawah SLB YPPALB, Kedungsari	044	Tanah	Pembelian	2001	1250 m2	Bidang	B	1	SK Wali
83	Sawah	Jl. Pulomas, bawah SLB YPPALB, Kedungsari	045	Tanah	Pembelian	2001	796 m2	Bidang	B	1	SK Wali
84	Sawah	Jl. Pulomas, bawah SLB YPPALB, Kedungsari	046	Tanah	Pembelian	2001	1400 m2	Bidang	B	1	SK Wali
85	Sawah	Jl. Pulomas, bawah SLB YPPALB, Kedungsari	047	Tanah	Pembelian	2001	800 m2	Bidang	B	1	SK Wali
86	Sawah	Kedungsari, Kedungsari	056	Tanah	Pembelian	2001	1385 m2	Bidang	B	1	SK Wali
87	Sawah	Dk. Larangan, barat BBI selang 1 petak, Potrobangsari	039	Tanah	Pembelian	2001	5000 m2	Bidang	B	1	SK Wali
88	Sawah	Kp. Pinggirejo Rt.04/07, Wates	013	Tanah	Pembelian	2001	1895 m2	Bidang	B	1	SK Wali
89	Sawah	Seduren, dekat makam Tuk Songo, Cacaban	030	Tanah	Pembelian	2001	2108 m2	Bidang	B	1	SK Wali

90	Sawah	Kp. Cacaban Barat, tepi kali Progo, Cacaban	037	Tanah	Pembelian	2001	345 m2	Bidang	B	1	SK Wali
91	Sawah	Kp. Kwayuhan, Gelangan	035	Tanah	Pembelian	2001	787 m2	Bidang	B	1	SK Wali
92	Rumah Dinas Walikota	Jl. Cempaka	35	Tanah	Pembelian	2001	4.162 m2	Bidang	B	1	-
93	Sawah	Kiringan RT.06/03, Tidar Utara	020	Tanah	Pembelian	2001	1700 m2	Bidang	B	1	SK Wali
94	Sawah	Kiringan RT.06/03, Tidar Utara	022	Tanah	Pembelian	2001	785 m2	Bidang	B	1	SK Wali
95	Tidar Selatan	-	HP 4	Tanah	Pembelian	2001	9894 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
96	Rumah Dinas Wakil Walikota	Jl. P. Diponegoro	-	Tanah	Pembelian	2001	603 m2	Bidang	B	1	-
97	Rumah Dinas Wakil Walikota	Jl. P. Diponegoro No.96	30	Tanah	Pembelian	2001	538 m2	Bidang	B	1	-
98	Cacaban	-	HP 46	Tanah	Pembelian	2001	428 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
99	Kedungsari	-	HP 68	Tanah	Pembelian	2001	2305 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
100	Rumah Dinas Sekda	Kelurahan Potrobangsari	13	Tanah	Pembelian	2001	878 m2	Bidang	B	1	-
101	Kedungsari	-	HP 68	Tanah	Pembelian	2001	2305 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
102	Kedungsari	-	HP 69	Tanah	Pembelian	2001	4100 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
103	Kedungsari	-	HP 69	Tanah	Pembelian	2001	4100 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
104	Kedungsari	-	HP 70	Tanah	Pembelian	2001	7426 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
105	Kedungsari	-	HP 70	Tanah	Pembelian	2001	2600 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
106	Kedungsari	-	HP 70	Tanah	Pembelian	2001	2600 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
107	Kedungsari	-	HP 71	Tanah	Pembelian	2001	1997 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
108	Kedungsari	-	HP 71	Tanah	Pembelian	2001	1900 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
109	Kedungsari	-	HP 71	Tanah	Pembelian	2001	1900 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
110	Kedungsari	-	HP 72	Tanah	Pembelian	2001	1900 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
111	Kedungsari	-	HP 72	Tanah	Pembelian	2001	1900 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
112	Kedungsari	-	HP 73	Tanah	Pembelian	2001	470 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
113	Kedungsari	-	HP 73	Tanah	Pembelian	2001	470 m2	Bidang	B	-	Audit BPK

114	Magelang	-	HP 73	Tanah	Pembelian	2001	5471 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
115	Kedungsari	-	HP 74	Tanah	Pembelian	2001	2200 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
116	Kedungsari	-	HP 74	Tanah	Pembelian	2001	2200 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
117	Kedungsari	-	HP 77	Tanah	Pembelian	2001	3010 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
118	Kedungsari	-	HP 78	Tanah	Pembelian	2001	730 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
119	Kedungsari	-	HP 78	Tanah	Pembelian	2001	730 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
120	Gedung DPRD	Banyurojo, Kabupaten Magelang	16	Tanah	Pembelian	2001	3.410 m2	Bidang	B	-	-
121	Kedungsari	-	HP 79	Tanah	Pembelian	2001	870 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
122	Kedungsari	-	HP 79	Tanah	Pembelian	2001	870 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
123	Kedungsari	-	HP 80	Tanah	Pembelian	2001	2000 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
124	Kedungsari	-	HP 80	Tanah	Pembelian	2001	2000 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
125	Kedungsari	-	HP 81	Tanah	Pembelian	2001	1235 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
126	Kedungsari	-	HP 81	Tanah	Pembelian	2001	1235 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
127	Kedungsari	-	HP 82	Tanah	Pembelian	2001	1291 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
128	Kedungsari	-	HP 82	Tanah	Pembelian	2001	1291 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
129	Kedungsari	-	HP 83	Tanah	Pembelian	2001	1150 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
130	Kedungsari	-	HP 84	Tanah	Pembelian	2001	1220 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
131	Kedungsari	-	HP 84	Tanah	Pembelian	2001	1220 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
132	Kedungsari	-	HP 85	Tanah	Pembelian	2001	2050 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
133	Kedungsari	-	HP 85	Tanah	Pembelian	2001	2050 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
134	Kedungsari	-	HP 86	Tanah	Pembelian	2001	1440 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
135	Kedungsari	-	HP 86	Tanah	Pembelian	2001	1440 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
136	Kedungsari	-	HP 87	Tanah	Pembelian	2001	1590 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
137	Kedungsari	-	HP 87	Tanah	Pembelian	2001	5471 m2	Bidang	B	-	Audit BPK

138	Kedungsari	-	HP 88	Tanah	Pembelian	2001	927 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
139	Kedungsari	-	HP 88	Tanah	Pembelian	2001	927 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
140	Kedungsari	-	HP 89	Tanah	Pembelian	2001	4270 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
141	Kedungsari	-	HP 89	Tanah	Pembelian	2001	4270 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
142	Kedungsari	-	HP 90	Tanah	Pembelian	2001	67100 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
143	Sawah	Jl. Barito II, timur-selatan SMA N 5	089	Tanah	Pembelian	2001	4270 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
144	Sawah Bero	Dumpoh Selatan, Potrobangsari	037	Tanah	Pembelian	2001	6628 m2	Bidang	B	1	SK Wali
145	Sawah, Kolam	Dk. Bogeman Wetan RT. 03/02, Panjang	018	Tanah	Pembelian	2001	989 m2	Bidang	B	1	SK Wali
146	Sawah, Pembibitan Tanaman Hias (Sisa IPLT)	Dumpoh, Gumuksari, Potrobangsari	055	Tanah	Pembelian	2001	5299 m2	Bidang	B	1	SK Wali
147	Sawah, Pemukiman Warga	Dk. Kwayuhan, Gelangan	008	Tanah	Pembelian	2001	1635 m2	Bidang	B	1	SK Wali
148	Sawah	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2001	36720 m2	Bidang	B	1	-
149	Pertanian	Cacaban Barat, Cacaban	028	Tanah	Pembelian	2001	997 m2	Bidang	B	1	SK Wali
150	Tegalan	RT. 08 RW.06 belakang SMP 13, Potrobangsari	035	Tanah	Pembelian	2001	3543 m2	Bidang	B	1	SK Wali
151	Kolam Ikan	Meteseh (belakang Depsos), Magelang	057	Tanah	Pembelian	2001	347 m2	Bidang	B	1	SK Wali
152	Rumah Dinas	Jl. Pangeran Diponegoro No. 108	-	Tanah	Pembelian	1979	257 m2	Bidang	B	1	-
153	Fasilitas Publik	Jl. P. Diponegoro (Gladiol)	-	Tanah	Pembelian	2003	10.910 m2	Bidang	B	-	-
154	Rumah Dinas Magelang Utara	Jl. A. Yani No. 282	-	Tanah	Pembelian	1970	445 m2	Bidang	B	1	-
155	Mess	Jl. Sunan Kalijogo VII No. 14 RT 01 RW 04 Jurangombo Selatan	-	Tanah	Pembelian	2001	294 m2	Bidang	B	1	-
156	Rumah Dinas DKK	Jl. Pahlawan No. 110	-	Tanah	Pembelian	2001	306 m2	Bidang	B	1	-
157	Rumah Dinas Kepala SPG	Jl. Alon-Alon Selatan	-	Tanah	Pembelian	2001	2.000 m2	Bidang	B	1	-
158	Mess Lembah Asri Kav A8	Lembah Asri No. 11, Mertoyudan	-	Tanah	Pembelian	2001	175 m2	Bidang	B	1	-
159	Rumah Dinas	Gelangan , Gelangan	021	Tanah	Pembelian	2001	190 m2	Bidang	B	1	SK Wali
160	Mess Cipta Karya	Jl. Tentara Pelajar No. 52	-	Tanah	Pembelian	2001	548 m2	Bidang	B	1	-
161	Mess Mawar	Jl. P. Diponegoro	32	Tanah	Pembelian	2001	1.207 m2	Bidang	B	1	-

162	Gedung Karang Taruna	Kebonpolo	-	Tanah	Pembelian	2001	1.000 m2	Bidang	B	-	Desk Tanah
163	Mess Pemkot	Jl. Pahlawan	-	Tanah	Pembelian	2001	320 m2	Bidang	B	1	-
164	Gedung Pertemuan	Kelurahan Magersari	-	Tanah	Pembelian	2001	1.954 m2	Bidang	B	-	-
165	Mess Eks Cipta Karya	Kemirirejo	-	Tanah	Pembelian	2014	687	Bidang	B	1	-
166	Mess Eks Cipta Karya	Kemirirejo	-	Tanah	Pembelian	2014	548	Bidang	B	1	-
167	Pemukiman Warga	Dk. Samban Lor, Gelangan (utara HP.7), Gelangan	019	Tanah	Pembelian	2001	202 m2	Bidang	B	1	SK Wali
168	Pasar Ikan	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend Soeprpto	HP 037	Tanah	Pembelian	1950	1577 m2	Bidang	B	1	-
169	Pasar Buah	Kel. Magersari, Dk Magersari	10	Tanah	Pembelian	2001	1.286 m2	Bidang	B	1	-
170	Pasar Sidomukti/Eks Pasar Kecamatan	Jl. Letjen Suprpto, Magersari	15	Tanah	Pembelian	2001	2.575 m2	Bidang	B	1	-
171	Pasar Sepeda	Jl. Ikhlas, sebelah BRI, Magersari	019	Tanah	Pembelian	2001	76 m2	Bidang	B	1	SK Wali
172	Pasar sisi Selatan	Rejowinangun Selatan	TN	Tanah	Pembelian	2014	650 m2	Bidang	B	1	-
173	Gedung Garba Parama Artha	Jl. Tidar No. 11, Kelurahan Magersari	17	Tanah	Pembelian	2001	1.150 m2	Bidang	B	1	-
174	Terminal Sambung	Kramat	-	Tanah	Pembelian	2001	400 m2	Bidang	B	1	-
175	Gudang Arsip DPPKD (Eks BKPM)	-	HP 046	Tanah	Pembelian	1950	428 m2	Bidang	B	1	-
176	DPU (Belakang)	-	HP 027	Tanah	Pembelian	1950	1152 m2	Bidang	B	1	-
177	Komplek Perdagangan dan Perkantoran; Eks Kantor PPP	-	HP 035	Tanah	Pembelian	1950	305 m2	Bidang	B	1	-
178	Lab Kes DKK	Jl. A. Yani No. 135	-	Tanah	Pembelian	1972	540 m2	Bidang	B	1	-
179	Gudang KPU	Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	007	Tanah	Eks Tanah Negara	1985	703 m2	Bidang	B	1	-
180	Gedung PDAM	Jl. Veteran	-	Tanah	Pembelian	2001	4.130 m2	Bidang	B	1	-
181	Gedung DPRD	Ds. Kranggan Mertoyudan	-	Tanah	Pembelian	2001	3.410 m2	Bidang	B	1	-
182	Koramil Magelang Selatan	Jl. Kahendran No. 51	-	Tanah	Pembelian	2001	235 m2	Bidang	B	1	-
183	UPTD Percetakan	Jl. Jend. Sudirman	-	Tanah	Pembelian	2001	3.000 m2	Bidang	B	1	-
184	Polsek Magelang Tengah	Jl. DI Panjaitan No. 15	-	Tanah	Pembelian	2001	458 m2	Bidang	B	1	-
185	Kantor Kelurahan Kedungsari	Kedungsari, Kedungsari	014	Tanah	Pembelian	2001	580 m2	Bidang	B	1	SK Wali

186	Kantor Pepabri	Jl. Margohardjo 2, Magelang	047	Tanah	Pembelian	2001	102 m2	Bidang	B	1	SK Wali
187	Tanah Sawah	Kelurahan Magersari	-	Tanah	Pembelian	2001	6.300 m2	Bidang	B	-	-
188	Magelang FM	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2014	285	Bidang	B	1	-
189	Kantor DPU	Magelang/ Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.152	Bidang	B	1	-
190	DPU	Magersari	Eks HP 6	Tanah	Pembelian	2014	1.400	Bidang	B	1	-
191	Ex. TK Negeri Pembina	Sanden	-	Tanah	Pembelian	1946	1.700 m2	Bidang	B	1	-
192	Sekolah dan Halaman	Jl. Potrobangsari I - Ex SDN Potrobangsari 5	-	Tanah	Pembelian	1955	1340 m2	Bidang	B	1	-
193	Ex. SD Cacaban 2	Jl. Sukorini No.47	-	Tanah	Pembelian	2001	13.885 m2	Bidang	B	1	-
194	Koramil Magelang Selatan	Jl. Kahendran No. 51	-	Tanah	Pembelian	2001	500 m2	Bidang	B	1	-
195	Sekolah Akademi Tirta Wiyata, Masjid	Jl. Duku, Kramat Selatan	001	Tanah	Pembelian	2001	4365 m2	Bidang	B	1	SK Wali
196	Sekolah TK Pertiwi 1	Jl. Diponegoro, Jl. Veteran, Magelang	055	Tanah	Pembelian	2001	1894 m2	Bidang	B	1	SK Wali
197	Sekolah TK Siwi Peni	Jl. Abimanyu, Gelangan	022	Tanah	Pembelian	2001	461 m2	Bidang	B	1	SK Wali
198	Sekolah TK Trisula	Dk. Bogeman Timur RT.03 RW.02, Panjang	022	Tanah	Pembelian	2001	93 m2	Bidang	B	1	SK Wali
199	SMP N 2	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2014	3.315	Bidang	B	1	-
200	Simpul Ekonomi	Jl. Soekarno Hatta	-	Tanah	Pembelian	2001	8.090 m2	Bidang	B	-	-
201	SMP N 2	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2014	2.535	Bidang	B	1	-
202	SMPN 9	Kedungsari	Eks HP 9	Tanah	Pembelian	2014	11.000	Bidang	B	1	-
203	Pertokoan (Eks Magelang dan Tidar theater)	Jl. A. Yani	-	Tanah	Pembelian	2001	4750 m2	Bidang	B	1	-
204	Taman Kyai Langgeng	Bayeman Mudal	944	Tanah	Pembelian	2001	5160 m2	Bidang	B	1	-
205	Taman	Jl. Pahlawan, dekat Badaan, Potrobangsari	046	Tanah	Pembelian	2001	166 m2	Bidang	B	1	SK Wali
206	Taman	Potrobangsari, dekat HM 2011, Potrobangsari	048	Tanah	Pembelian	2001	80 m2	Bidang	B	1	SK Wali
207	Taman	Dk. Jaranan, RT.03 RW.07, Rejowinangun Utara	033	Tanah	Pembelian	2001	33 m2	Bidang	B	1	SK Wali
208	Taman Kota	Jl. Brigjen.Katamso-P. Diponegoro RT.07 RW.05, Kemirirejo	038	Tanah	Pembelian	2001	174 m2	Bidang	B	1	SK Wali
209	Taman Monumen Tentara Pelajar	Jl. Tentara Pelajar, Kemirirejo	037	Tanah	Pembelian	2001	705 m2	Bidang	B	1	SK Wali

210	Taman Pentiveri 1	Pertigaan Jl. Diponegoro-Pahlawan, Magelang	048	Tanah	Pembelian	2001	50 m2	Bidang	B	1	SK Wali
211	Simpul Ekonomi	Tuk Pecah	-	Tanah	Pembelian	2001	6.230 m2	Bidang	B	-	-
212	Taman Pentiveri 2	Pertigaan Jl. Diponegoro-Pahlawan, Magelang	050	Tanah	Pembelian	2001	403 m2	Bidang	B	1	SK Wali
213	Taman Plengkung	Jl. Jend. A. Yani, Magelang	056	Tanah	Pembelian	2001	1398 m2	Bidang	B	1	SK Wali
214	Taman, RT.06 RW.08	Jl. Diponegoro, Jl Panjaitan, Cacaban	039	Tanah	Pembelian	2001	148 m2	Bidang	B	1	SK Wali
215	Kolam renang pihak swasta	Jl. P. Diponegoro	-	Tanah	Pembelian	2003	7151 m2	Bidang	B	1	-
216	Gladiool Perumahan	JL. MT. Haryono	-	Tanah	Pembelian	2003	3620 m2	Bidang	B	1	-
217	Taman Gladiool	JL. MT. Haryono	-	Tanah	Pembelian	2003	139 m2	Bidang	B	1	-
218	SPBU Trunan	Jl. Sudirman	-	Tanah	Pembelian	2009	2.650 m2	Bidang	B	1	-
219	Pekarangan	Telogo Worno	-	Tanah	Pembelian	2001	500 m2	Bidang	B	-	Desk Tanah
220	Balai Desa	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2001	2.143 m2	Bidang	B	1	-
221	Balai Desa	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2001	2.230 m2	Bidang	B	1	-
222	Simpul Ekonomi (Pembayaran PBB)	Kecamatan Magelang Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	-	Bidang	B	-	Desk Tanah
223	Balai Rukun Warga	Kelurahan Magelang, Kampung Dukuh	42	Tanah	Pembelian	2001	400 m2	Bidang	B	1	-
224	Balai Rukun Warga	Kelurahan Magelang, Kampung Dukuh	41	Tanah	Pembelian	2001	411 m2	Bidang	B	1	-
225	Gedung Kyai Sepanjang	Jl. Kartini, Kelurahan Magelang	24	Tanah	Pembelian	2001	3.830 m2	Bidang	B	1	-
226	Lokasi Untidar	Jl. Sidotopo, barat SMA N 5 (lokasi Untidar)	094	Tanah	Pembelian	2001	43850 m2	Bidang	B	-	Hibah Untidar
227	Gedung Wanita	Jl. Veteran	-	Tanah	Pembelian	2001	2.195 m2	Bidang	B	1	-
228	Balai RT.01 RW.07, PKK Posyandu	Dk. Jaranan, Rejowinangun Utara	030	Tanah	Pembelian	2001	59 m2	Bidang	B	1	SK Wali
229	Balai RT.03	Dekat Makam Kyai Melik, Gelangan	029	Tanah	Pembelian	2001	103 m2	Bidang	B	1	SK Wali
230	Balai RT.06	Jl. Abimanyu, Gelangan	031	Tanah	Pembelian	2001	99 m2	Bidang	B	1	SK Wali
231	Balai RW	Dekat TK Siwi Peni, Gelangan	028	Tanah	Pembelian	2001	139 m2	Bidang	B	1	SK Wali
232	Balai RW.06 (Eks Taman Kota)	Jl. Brigjen. Katamso-P. Diponegoro RT.07 RW.05, Kemirirejo	039	Tanah	Pembelian	2001	293 m2	Bidang	B	1	SK Wali
233	Balai RW.07 Panjang Baru	Tepi Kali Kedali, Gelangan	030	Tanah	Pembelian	2001	203 m2	Bidang	B	1	SK Wali

234	Simpul Ekonomi	Jl. Soekarno Hatta	-	Tanah	Pembelian	2002	11.589 m2	Bidang	B	-	-
235	Gedung Pertemuan Magersari	Dk. Sidosari, Magersari	012	Tanah	Pembelian	2001	1680 m2	Bidang	B	1	SK Wali
236	Jurangombo Utara	-	HP 6	Tanah	Pembelian	2001	409 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
237	Jurangombo Utara	-	HP 7	Tanah	Pembelian	2001	834 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
238	Jurangombo Selatan	-	HP 21	Tanah	Pembelian	2001	249 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
239	Kedungsari	-	HP 76	Tanah	Pembelian	2001	1000 m2	Bidang	B	-	Audit BPK
240	Puskesmas Magelang Tengah	Kp. Dukuh, Magelang	049	Tanah	Pembelian	2001	431 m2	Bidang	B	1	SK Wali
241	Puskesmas Pembantu Ngembik	Kp. Ngembik, Perum Korpri, Kramat Selatan	038	Tanah	Pembelian	2001	690 m2	Bidang	B	1	SK Wali
242	Pengembangan Tanaman Hias	Kelurahan Cacaban	-	Tanah	Pembelian	2006	3.900 m2	Bidang	B	1	-
243	Pos Siskamling	Jl. Diponegoro-Jl. Merbabu, Cacaban	042	Tanah	Pembelian	2001	41 m2	Bidang	B	1	SK Wali
244	IPLT	Kelurahan Kramat	-	Tanah	Pembelian	1995	10.400 m2	Bidang	B	1	-
245	UPT Pemadam Kebakaran, Prima Oto	Jl. Pahlawan	-	Tanah	Pembelian	2001	4.085 m2	Bidang	B	1	-
246	Fasilitas Umum, Gudang	Kp. Rejosari Barakan, Magersari	020	Tanah	Pembelian	2001	295 m2	Bidang	B	1	SK Wali
247	Fasum MCK	Jl. Merbabu Jambon Wot, Cacaban	044	Tanah	Pembelian	2001	197 m2	Bidang	B	1	SK Wali
248	Warung PKK	Jl. Pahlawan, Botton 2, Magelang	046	Tanah	Pembelian	2001	124 m2	Bidang	B	1	SK Wali
249	Potrobangsari	Potrobangsari	-	Tanah	Pembelian	2001	2.650 m2	Bidang	B	1	-
250	Tanah Kosong sebagian untuk rencana Lokasi gedung Arsip	Dk. Tidar Baru	-	Tanah	Pembelian	2001	6.300 m2	Bidang	B	1	-
251	Instalasi Farmasi	Jl. Beringin, Kel. Tidar Utara	17	Tanah	Pembelian	2001	2.063 m2	Bidang	B	1	-
252	Rusunawa Tidar Utara	Dk. Tidar Krajan/Secangking Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	4.200 m2	Bidang	B	1	-
253	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 029	Tanah	Pembelian	1950	1.424	Bidang	B	1	-
254	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 030	Tanah	Pembelian	1950	290	Bidang	B	1	-
255	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 031	Tanah	Pembelian	1950	1.510	Bidang	B	1	-
256	Shelter DPP dan Kosong	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto, Kel. Magersari	HP 032	Tanah	Pembelian	1950	3.845	Bidang	B	1	-
257	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 033	Tanah	Pembelian	1950	319	Bidang	B	1	-

258	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 034	Tanah	Pembelian	1950	307	Bidang	B	1	-
259	Komplek Tidar Indah, Jl. Letjend. Soeparapto	Kel. Magersari	HP 036	Tanah	Pembelian	1950	410	Bidang	B	1	-
260	Depo Sampah DKPTK dan Kosong	Jl. Soekarno Hatta-Jl. Beringin II (sebelah utara Gethuk Marem), Kel.	HP 014	Tanah	Pembelian	1950	471	Bidang	B	1	-
261	Eks. Bengkok Kemirirejo	Kemirirejo	-	Tanah	Pembelian	2001	97 m2	Bidang	B	1	-
262	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	2.390 m2	Bidang	B	1	-
263	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Kp. Canguk, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	1.500 m2	Bidang	B	1	-
264	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	3.900 m2	Bidang	B	1	-
265	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	2.690 m2	Bidang	B	1	-
266	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	1.100 m2	Bidang	B	1	-
267	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	900 m2	Bidang	B	1	-
268	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	1598 m2	Bidang	B	1	-
269	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	1006 m2	Bidang	B	1	-
270	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	2170 m2	Bidang	B	1	-
271	Kawasan Perdagangan Jl. Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2001	2425 m2	Bidang	B	1	-
272	PDAM, Kawasan sumber air	Tuk Pecah, Kel. Wates	-	Tanah	Pembelian	2001	2.650 m2	Bidang	B	1	-
273	PDAM, Kawasan sumber air	Tuk Pecah	-	Tanah	Pembelian	2001	2.580 m2	Bidang	B	1	-
274	PDAM, Kawasan sumber air	Tuk Pecah	-	Tanah	Pembelian	2001	1.000 m2	Bidang	B	1	-
275	Simpul Ekonomi	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2001	11.040 m2	Bidang	B	1	-
276	Pustu Kramat Utara	Perum RSJP Blok D8 Kramat Utara	994	Tanah	Pembelian	2001	718 m2	Bidang	B	1	-
277	Lapangan Kwarasan	Jl. Sumbing, Kelurahan Cacaban	23	Tanah	Pembelian	2001	2.490 m2	Bidang	B	1	-
278	Pekarangan	Kelurahan Kramat, Perum RSJP Blok C1	990	Tanah	Pembelian	2001	268 m2	Bidang	B	1	-
279	Balai Penyuluhan KB	Perum RSJP Blok D8 Kramat Utara	1.353	Tanah	Pembelian	2001	360 m2	Bidang	B	1	-
280	Sebagian untuk BPKB BPMPKB (eks Kantor kecamatan Magelang selatan	Jl. Raya Sidosari Kel. Magersari	-	Tanah	Pembelian	2001	1.954 m2	Bidang	B	1	-
281	Halaman Rusunawa Potrobangsari	Kp. Gumukrejo RT.01 RW.04, Potrobangsari	058	Tanah	Pembelian	2001	955 m2	Bidang	B	1	SK Wali

282	Tanah Kosong	Selatan-barat SMA N 5	078	Tanah	Pembelian	2001	730 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
283	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara-barat jalan utama	092	Tanah	Pembelian	2001	14350 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
284	Lapangan Tenis	Ds. Kranggan Mertoyudan	-	Tanah	Pembelian	2003	1.510 m2	Bidang	B	-	Desk Tanah
285	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara-barat bunderan	096	Tanah	Pembelian	2001	540 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
286	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara-timur bunderan	097	Tanah	Pembelian	2001	2280 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
287	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara-timur bunderan	013	Tanah	Pembelian	2001	1659 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
288	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara-timur bunderan	014	Tanah	Pembelian	2001	9330 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
289	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara bunderan	HM 1723	Tanah	Pembelian	2001	495 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
290	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara bunderan	HM 1724	Tanah	Pembelian	2001	560 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
291	Tanah Kosong	Jl. Sidotopo, utara bunderan	-	Tanah	Pembelian	2001	902 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
292	Simpul Ekonomi	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2002	11.785 m2	Bidang	B	1	-
293	Simpul Ekonomi	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2003	23.040 m2	Bidang	B	1	-
294	Simpul Ekonomi	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2004	4.950 m2	Bidang	B	1	-
295	Pembangunan Kawasan Sidotopo	Kelurahan Kramat	-	Tanah	Pembelian	2006	- m2	Bidang	B	1	-
296	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	460	Bidang	B	1	-
297	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	291	Bidang	B	1	-
298	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.505	Bidang	B	1	-
299	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	377	Bidang	B	1	-
300	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.813	Bidang	B	1	-
301	Mushola	Dukuh Tidar Baru	-	Tanah	Pembelian	2001	130 m2	Bidang	B	-	-
302	Mushola	Dk. Karet	-	Tanah	Pembelian	2001	430 m2	Bidang	B	-	-
303	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	3.690	Bidang	B	1	-
304	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	488	Bidang	B	1	-
305	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	340	Bidang	B	1	-

306	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.580	Bidang	B	1	-
307	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2014	2.390	Bidang	B	1	-
308	Kawasan Perdagangan	Tidar Utara	-	Tanah	Pembelian	2014	1.500	Bidang	B	1	-
309	Work platform	Krisbow KW05-496	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
310	Hydraulic Hand Stacker	Krisbow	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
311	Compressor	Swan	-	Besi	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
312	Genset	Honda GX270	-	Besi	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
313	Genset	Superwatt P60PB/60 KVA	-	Besi	Pembelian	2014	60 KVA	Unit	B	1	-
314	Genset	Superwatt P60PB/200 KVA	-	Besi	Pembelian	2014	200 KVA	Unit	B	1	-
315	Mesin Pompa Air	Lakoni SJ 500	-	Besi	Pembelian	2002	-	Unit	B	1	-
316	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 707	Tanah	Pembelian	2014	1.100	Bidang	B	1	-
317	Pompa Air	Grundfos, NF 30-18 M	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
318	Pompa Air	Sanyo, PH 137 AC	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
319	Pompa Air	Panasonic	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
320	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 721	Tanah	Pembelian	2014	2.170	Bidang	B	1	-
321	Pompa Air	Tsurumi	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	2	-
322	Pompa Air	Multipro	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
323	Pompa Air	Panasonic	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	2	-
324	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 712	Tanah	Pembelian	2014	900	Bidang	B	1	-
325	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 713	Tanah	Pembelian	2014	3.900	Bidang	B	1	-
326	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 719	Tanah	Pembelian	2014	1.006	Bidang	B	1	-
327	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 720	Tanah	Pembelian	2014	2.425	Bidang	B	1	-
328	Sedan	Toyota Vios 1,5 G	MR053HY9379006565	Besi	Pembelian	2007	1497 CC	Unit	B	1	AA 9504 SH
329	Sedan	Toyota Vios 1,5 G	MR053HY9379006442	Besi	Pembelian	2007	1497 CC	Unit	B	1	AA 9506 SH

330	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 706	Tanah	Pembelian	2014	2.390	Bidang	B	1	-
331	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.577	Bidang	B	1	-
332	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	410	Bidang	B	1	-
333	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	305	Bidang	B	1	-
334	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	307	Bidang	B	1	-
335	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	319	Bidang	B	1	-
336	Sedan	Toyota New Camry 2.4 V	MR053BK4099006909	Besi	Pembelian	2009	2362 CC	Unit	B	1	AA 1 A
337	Sedan	Toyota New Camry 2.4 V	MR053BK4099006856	Besi	Pembelian	2009	2362 CC	Unit	B	1	AA 9509 JS
338	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	3.645	Bidang	B	1	-
339	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.510	Bidang	B	1	-
340	Sedan (Ass II)	Toyota Vios 1.5G MT	MR053HY93C9049485	Besi	Pembelian	2012	1497 CC	Unit	B	1	AA 9509 WH
341	Sedan	Toyota Vios 1.5 G M/T	MHFBT9F37E6016551	Besi	Pembelian	2014	1497 CC	Unit	B	1	AA 9502 CS
342	Sedan	Toyota Vios 1.5 G M/T	MHFBT9F37E6014606	Besi	Pembelian	2014	1497 CC	Unit	B	1	AA 9503 CS
343	Sedan	Toyota Vios 1.5 G M/T	MHFBT9F39F6065218	Besi	Pembelian	2015	1497 CC	Unit	B	1	AA 9508 DS
344	Sedan	Toyota Vios 1.5 G M/T	MHFBT9F32F6066646	Besi	Pembelian	2015	1497 CC	Unit	B	1	AA 9509 DS
345	Sedan	Honda Accord CR2 2.4 VTIL AT	MRHCR2640GP610345	Besi	Pembelian	2016	2354 CC	Unit	B	-	AA 2 A
346	Sedan	Toyota All New Corolla Altis 1.8V Automatic	MR053REH2G4102955	Besi	Pembelian	2016	1795 CC	Unit	B	1	AA 5 A
347	Sedan	Toyota All New Corolla Altis 1.8V Automatic	MR053REH2G4103183	Besi	Pembelian	2016	1798 CC	Unit	B	1	AA 6 A
348	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	1.424	Bidang	B	1	-
349	Kherkoff	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	290	Bidang	B	1	-
350	Sidotopo	Kedungsari	HP	Tanah	Pembelian	2014	67.148	Bidang	B	1	-
351	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 323	Tanah	Pembelian	2014	1.598	Bidang	B	1	-
352	Station Wagon	Daihatsu S91	S913025234	Besi	Pembelian	2000	1295 CC	Unit	B	1	AA 9566 BH
353	Jl. Soekarno Hatta	Tidar Utara	Eks HM 991	Tanah	Pembelian	2014	2.690	Bidang	B	1	-

354	Eks Depo Sampah Tidut	Tidar Utara	TN	Tanah	Pembelian	2014	500	Bidang	B	1	-
355	Tanah Jalan	Cacaban - Hotel Puri Asri	-	Tanah	Pembelian	2001	1.360 m2	Bidang	B	1	-
356	Station Wagon	Opel Blazer	S76125067	Besi	Pembelian	2001	2200 CC	Unit	B	1	AA 39 A
357	Fasum Jalan Masuk Puri Nirwana	Jl. Abimanyu, Gelangan	033	Tanah	Pembelian	2001	262 m2	Bidang	B	1	SK Wali
358	Lapangan Tenis DPRD	Banyurojo	-	Tanah	Pembelian	2001	1.510 m2	Bidang	B	1	-
359	Lapangan	Dk. Jaranan, Rejowinangun Utara	034	Tanah	Pembelian	2001	86 m2	Bidang	B	1	SK Wali
360	Lapangan Bulutangkis	Kedungsari, Kedungsari	050	Tanah	Pembelian	2001	89 m2	Bidang	B	1	SK Wali
361	Lapangan Bulutangkis	Bogeman Timur RT.02/08, selatan makam Kyai Bogem, Panjang	019	Tanah	Pembelian	2001	144 m2	Bidang	B	1	SK Wali
362	Lapangan Bulutangkis	Tukangan Wetan RT.02 RW.01, Rejowinangun Utara	029	Tanah	Pembelian	2001	252 m2	Bidang	B	1	SK Wali
363	Lapangan Bulutangkis	Dk. Jaranan RT.02 RW.07, Rejowinangun Utara	032	Tanah	Pembelian	2001	42 m2	Bidang	B	1	SK Wali
364	Lapangan Candi	Candi Nambangan, Rejowinangun Utara	036	Tanah	Pembelian	2001	7620 m2	Bidang	B	1	SK Wali
365	Station Wagon	Toyota Avanza 1.3	MHFFMREK36K012839	Besi	Pembelian	2006	1297 CC	Unit	B	1	AA 9503 NH
366	Station Wagon	Toyota Avanza	MHFM1BA3J7K065262	Besi	Pembelian	2007	1298 CC	Unit	B	1	AA 9508 QH
367	Lapangan SMAN 5	Jl. Barito Sidotopo, Kedungsari	051	Tanah	Pembelian	2001	8133 m2	Bidang	B	1	SK Wali
368	Lapangan Voli	Jl. Sunan Kalijaga Raya, Jurangombo Selatan	031	Tanah	Pembelian	2001	550 m2	Bidang	B	1	SK Wali
369	Lapangan Voli / Eks Sawah	Tepi kali Ello, Kedungsari	027	Tanah	Pembelian	2001	685 m2	Bidang	B	1	SK Wali
370	Station Wagon	Toyota Kijang Innova V	MHFXW43G1C4065339	Besi	Pembelian	2012	1998 CC	Unit	B	1	AA 99 A
371	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T S.Up	MHCTBR54FDK167470	Besi	Pembelian	2013	1998 CC	Unit	B	1	AA 9501 AS
372	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova 2.0 G M/T S.Up	MHCTBR54FDK167463	Besi	Pembelian	2013	1998 CC	Unit	B	1	AA 9502 AS
373	Station Wagon	KIA Pregio SE OPT 2.7 DSL CBU	PNAKF5S03DG003863	Besi	Pembelian	2013	2665 CC	Unit	B	1	AA 9500 CS
374	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova 2.0 V M/T Luxury	MHCTBR54FDK167237	Besi	Pembelian	2013	1998 CC	Unit	B	1	AA 17 A (AA 9500 AS)
375	Station Wagon	Toyota Grand New Avanza 1.3 G M/T	MHKM5EA3JGKO31982	Besi	Pembelian	2016	1329 CC	Unit	B	-	AA 9502 HS
376	Lapangan Voli Menowo	Kedungsari, Kedungsari	016	Tanah	Pembelian	2001	800 m2	Bidang	B	1	SK Wali
377	Pekarangan, Lapangan	Menowo, Kedungsari	054	Tanah	Pembelian	2001	1109 m2	Bidang	B	1	SK Wali

378	Lapangan Bulu Tangkis	Dk. Tidar Baru, Kelurahan Magersari	9	Tanah	Pembelian	2001	130 m2	Bidang	B	1	-
379	Parkir Depan Giant	Magersari	HP 028	Tanah	Pembelian	1950	600	Bidang	B	1	-
380	Parkir Depan Giant	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	600	Bidang	B	1	-
381	Micro Bus	Mitsubishi Colt Diesel FE 849 BC (4x2) M/T	MHMFE84PBEJ006433	Besi	Pembelian	2014	3908 CC	Unit	B	1	AA 9513 AH
382	Pick Up	Toyota Kijang	MHF31KF6020016185	Besi	Pembelian	2002	1781 CC	Unit	B	1	AA 9571 KA
383	Depo Sampah	Jl. P. Diponegoro, Cacaban	035	Tanah	Pembelian	2001	212 m2	Bidang	B	1	SK Wali
384	Sepeda Motor	Suzuki Bravo	-	Besi	Pembelian	2000	110 CC	Unit	B	1	AA 602 BA
385	Sepeda Motor	Honda Legenda	MH1NFGE121KO75197	Besi	Pembelian	2001	100 CC	Unit	B	1	AA 9620 AA
386	Sepeda Motor	Honda Legenda	MH1NFGE181K066942	Besi	Pembelian	2001	110 CC	Unit	B	1	AA 9639 AA
387	Tanah Jalan	Sidotopo	-	Tanah	Pembelian	2001	10907 m2	Bidang	B	1	-
388	Pelebaran Jalan dr. Kusen	Jlodran, Kel. Kedungsari	-	Tanah	Pembelian	2006	- m2	Bidang	B	1	-
389	Jalan	Jl. Sidotopo, jalan utama bagian barat	093	Tanah	Pembelian	2001	2880 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
390	Sepeda Motor	Astrea Legenda	MH1NFGE102K241623	Besi	Pembelian	2002	100 CC	Unit	B	1	AA 9908 AA
391	Jalan	Jl. Sidotopo, jalan utama bagian selatan bunderan	095	Tanah	Pembelian	2001	508 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
392	Jalan	Jl. Sidotopo, jalan utama bagian timur	098	Tanah	Pembelian	2001	2740 m2	Bidang	B	1	Koreksi Neraca
393	Sepeda Motor	Honda Legenda	MH1NFGF173K309464	Besi	Pembelian	2003	110 CC	Unit	B	1	AA 9689 AA
394	Sepeda Motor (eks UP3AD)	Honda Legenda	MH1NFGF193K309451	Besi	Pembelian	2003	110 CC	Unit	B	1	AA 9687 AA
395	GOR Samapta	Kelurahan Kramat	-	Tanah	Pembelian	2006	39.566 m2	Bidang	B	1	-
396	GOR Samapta	Kelurahan Kramat	-	Tanah	Pembelian	2007	9.559 m2	Bidang	B	1	-
397	GOR Samapta	Kelurahan Kramat	-	Tanah	Pembelian	2007	11.352 m2	Bidang	B	1	-
398	Sepeda Motor	Honda	MH1HB61127KO55923	Besi	Pembelian	2007	100 CC	Unit	B	1	AA 9745 BA
399	Mushola Nur Iman	KP. Mijil RT 10 RW.09, Kel. Magersari	HP 039	Tanah	Pembelian	1950	32 m2	Bidang	B	1	-
400	Masjid	Jl. Sunan Bonang, Karet Kel. Jurangombo Selatan	24	Tanah	Pembelian	2001	430 m2	Bidang	B	1	-
401	Masjid	Jl. Sunan Kalijogo, Jurangombo, Dk. Karet	23	Tanah	Pembelian	2001	1.292 m2	Bidang	B	1	-

402	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	MH1JB811X7K059666	Besi	Pembelian	2007	125 CC	Unit	B	1	AA 9820 BA
403	Sepeda Motor	Honda Supra X-125	MH1JB811X7K0S9666	Besi	Pembelian	2008	125 CC	Unit	B	1	AA 9819 BA
404	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	MH1JB81178K166160	Besi	Pembelian	2008	125 CC	Unit	B	1	AA 9818 BA
405	Masjid	Jl. P. Diponegoro	22	Tanah	Pembelian	2001	642 m2	Bidang	B	1	-
406	Masjid	Kedungsari, Kedungsari	049	Tanah	Pembelian	2001	654 m2	Bidang	B	1	SK Wali
407	Masjid Al Hikmah Menowosari	Menowo (samping Wisma Sejahtera), Kedungsari	055	Tanah	Pembelian	2001	254 m2	Bidang	B	1	SK Wali
408	Sepeda Motor	Yamaha 1 DY CW	MH31DY008EJ266953	Besi	Pembelian	2014	125 CC	Unit	B	1	AA 9623 DA
409	Sepeda Motor	Yamaha 55S (T135SEC)	MH355SOO5EK148720	Besi	Pembelian	2014	135 CC	Unit	B	1	AA 9658 DA
410	Sepeda Motor	Yamaha 55S (T135SEC)	MH355SOO5EK147345	Besi	Pembelian	2014	135 CC	Unit	B	1	AA 9661 DA
411	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ101698	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
412	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ102368	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
413	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ099642	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
414	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ101674	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
415	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ109252	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
416	Sepeda Motor	UE11 (Cast Wheel)	MH3UE1120GJ107983	Besi	Pembelian	2016	113 CC	Unit	B	-	-
417	IC Meter	Walking Measure	-	Mika	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
418	Masjid Agung Kauman	Jl. Tentara Pelajar, Cacaban	041	Tanah	Pembelian	2001	3586 m2	Bidang	B	1	SK Wali
419	Masjid Baiturrohman Kelurahan Magelang	Jl. Margohardjo 2, Magelang	052	Tanah	Pembelian	2001	1024 m2	Bidang	B	1	SK Wali
420	Mushola Sumber Barokah RT.03 RW.14	Malanggaten, Rejowinangun Utara	031	Tanah	Pembelian	2001	338 m2	Bidang	B	1	SK Wali
421	Chain Saw	Tasto Type 007	-	Besi	Pembelian	2016	Besar	Unit	B	1	-
422	Chain Saw	Sumura Type 5800	-	Besi	Pembelian	2016	22"	Unit	B	1	-
423	Komposter Komunal	-	-	Plastik	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
424	Mesin Ketik Manual Standar	-	-	Besi, Mika	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	-
425	Mesin Ketik Elektronik	Brother	-	Besi, Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	-

426	Mesin Ketik	Olivetty 98	-	Mika	Pembelian	2012	25"	Unit	B	1	-
427	Mesin Hitung	Casio	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
428	Mushola	Magersari	TN	Tanah	Pembelian	2014	32 m2	Bidang	B	1	-
429	Mesin Pompa Air - Mess Potro	Panasonic	-	Besi	Pembelian	2014	200 W	Unit	B	1	-
430	Pompa Air	Grundfos	-	Besi	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
431	Sedan	Timor	KNAFA3232V5706301	Besi	Pembelian	2001	1500 CC	Unit	B	1	AA 9504 LH
432	Almari Arsip Besi	Lufo	-	Besi	Pembelian	2012	-	Unit	B	3	-
433	Sedan	Toyota Soluna	MHF53AN5017033965	Besi	Pembelian	2001	1500 CC	Unit	B	1	AA 469 A
434	Rak Baja 4 Tingkat	VIP V-905	-	Besi	Pembelian	2014	100x38x200	Unit	B	1	-
435	Sedan	Toyota Soluna	MHF53AN5027040344	Besi	Pembelian	2002	1498 CC	Unit	B	1	AA 9502 DH
436	Sedan	Honda Accord VTI	MHRS865102J000124	Besi	Pembelian	2002	2254 CC	Unit	B	1	AA 9503 VH
437	Sedan	Honda City 1.5 VTI AT	L15416801678	Besi	Pembelian	2007	1497 CC	Unit	B	1	AA 9509 PH
438	Filling Kabinet Besi	Brother	-	Besi	Pembelian	2008	4 Laci	Unit	B	5	R. Tamu (1), R. Staff Perengkapan (3)
439	Filling Kabinet	Brother	-	Besi	Hibah	2010	4 laci	Unit	RB	2	Ex. Panwaslu
440	Sedan	Honda City 1.5 VTI AT	MRHGD86807P830837	Besi	Pembelian	2007	1497 CC	Unit	B	1	AA 9508 PH
441	Sedan	Toyota Vios 1.5 G MT	MRHGD86807P830837	Besi	Pembelian	2007	1497 CC	Unit	B	1	AA 9507 SH
442	Sedan	Honda City	MHRGD86708P841336	Besi	Pembelian	2008	1497 CC	Unit	B	1	AA 9502 FA (Eks AA 7 A)
443	Neon Sign Pendopo	-	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
444	Sedan	Honda City	MHRGD86708P841002	Besi	Pembelian	2008	1497 CC	Unit	B	1	AA 9501 FA (Eks AA 9 A)
445	Bagan Jabatan	-	-	Kayu	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
446	Sedan	Honda City GM2 1.5 EAT	MRHGM26609P92038 5	Besi	Pembelian	2009	1497 CC	Unit	B	1	AA 9501 HS (Eks AA 5 A)
447	Sedan	Toyota Grand New Corolla Altis 1.9 G A/T	MR053REE2B4301040	Besi	Pembelian	2011	1798 CC	Unit	B	1	AA 9503 WH
448	White Board	-	-	Kayu	Hibah	2010	Sedang	Unit	RB	1	Ex. Panwaslu
449	Sedan	Toyota Corolla Altis 2.0 V/AT	MR053REE384300814	Besi	Pembelian	2011	1987 CC	Unit	B	1	AA 9507 GS (Eks AA 1 BA)

450	LCD Projector	Infocus IN2126	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	2	-
451	Station Wagon (KONI)	Mitsubishi L300	L300GB006413	Besi	Pembelian	1986	-	Unit	B	1	AA 9505 EH
452	LCD Projector	Infocus IN 3124	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
453	LCD Proyektor	Sony VPL-SW630	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	2	-
454	LCD Projector	Infocus Projector [IN116A]	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
455	Station Wagon	Toyota Kijang SPR LG / KF 50	KF50125428	Besi	Pembelian	1992	1486 CC	Unit	B	1	AA 9508 HH
456	Layar LCD	Toshiba	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
457	Projector Screen	Brite Manual 84-inch	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
458	Projector Screen	Brite Tripod	-	Mika	Pembelian	2016	96"	Unit	B	1	-
459	Station Wagon	Toyota Kijang	MHF21NF3121K4779IZ	Besi	Pembelian	1994	1486 CC	Unit	B	1	AA 9502 HH
460	Station Wagon	Toyota Kijang	MHF11KF8000041241	Besi	Pembelian	1997	1781 CC	Unit	B	1	AA 9505 VA
461	Lemari	-	-	Kayu	Hibah	2010	-	Unit	B	1	Ex. Panwaslu
462	Lemari	-	-	Kayu	Pembelian	2010	-	Unit	B	1	-
463	Almari Arsip Besar	-	-	Kayu	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
464	Station Wagon	Daihatsu Taruna	MHKT6RVHDYK007695	Besi	Pembelian	2000	1589 CC	Unit	B	1	AA 9504 UH
465	Station Wagon	Mitsubishi L300	MHML300DB2R227280	Besi	Pembelian	2001	2477 CC	Unit	B	1	AA 9500 DH
466	Station Wagon (BPN)	Toyota Kijang	MHF11UF8110015324	Besi	Pembelian	2001	1998 CC	Unit	B	1	AA 9501 WH
467	Lemari Kayu	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2016	p240xt120xd50	Unit	B	1	RS Lantai 2
468	Almari Garasi VIP	Buatan	-	Kayu Jati	Pembelian	2016	p280xt60xd55	Unit	B	1	-
469	Station Wagon	Suzuki ST 150 Futura	MHYESL4152J521231	Besi	Pembelian	2002	1493 CC	Unit	B	1	AA 9501 MH
470	Station Wagon	Suzuki 1500 GRV	MHYESL4152J531688	Besi	Pembelian	2002	1493 CC	Unit	B	1	AA 9505 BH
471	Station Wagon	Toyota Kijang	MHF31KF6020016890	Besi	Pembelian	2002	1781 CC	Unit	B	1	AA 976 A
472	Station Wagon	Toyota Kijang	-	Besi	Pembelian	2002	-	Unit	B	1	AA 975 BA
473	Station Wagon	Toyota Kijang	MHF11UF8120019786	Besi	Pembelian	2002	1998 CC	Unit	B	1	AA 9504 CH

474	Station Wagon	Mitsubishi L300	MHML300DB3R231620	Besi	Pembelian	2003	2477 CC	Unit	B	1	AA 9504 KH
475	Station Wagon	Mitsubishi L300	MHML300DB3R231619	Besi	Pembelian	2003	2477 CC	Unit	B	1	AA 9502 KH
476	Meja Kursi (Ruang Rokok)	-	-	Besi	Pembelian	2009	-	Unit	B	3	-
477	Zice	-	-	Kayu, Spon	Pembelian	2010	-	Unit	B	1	-
478	Meja Kursi Tamu Sofa 3111	Italy	-	Kayu	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
479	Kursi Teras dan Meja	-	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
480	Station Wagon	Suzuki ST 150 Futura	MHYESL4155J575652	Besi	Pembelian	2005	1493 CC	Unit	B	1	AA 9508 MH
481	Meja Kursi Tamu	Sofa Kayu 311 Livina	-	Kayu	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	Lobi
482	Meja Kursi Tamu	-	-	Kayu Jati	Pembelian	2016	-	Unit	B	4	Adipura
483	Meja Kursi Tamu Eselon III	Sofa Jati 311 + Meja	-	Kayu, Spon	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
484	Tempat Tidur (Matras)	Guhdo	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
485	Tempat Tidur (Mat Busa)	-	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
486	Tempat Tidur (Mat Spring Bed)	-	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
487	Tempat Tidur (Bed Minimalis)	Natural	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
488	Tempat Tidur (Bed Minimalis Hitam)	-	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
489	Tempat Tidur (Mat Spring Bed)	Guhdo	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
490	Tempat Tidur (Spring Bed)	Heavenly Fortuna	-	Spon	Pembelian	2014	-	Unit	B	4	-
491	Station Wagon	Kijang Innova	MHF4W42G172104238	Besi	Pembelian	2007	1998 CC	Unit	B	1	AA 9508 RH
492	Meja Rapat	-	-	Kayu	Pembelian	2003	-	Unit	B	25	dr Umum
493	Meja Pimpinan	-	-	Kayu	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	Adipura
494	Meja Rapat Ruang Sidang Lt 1	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
495	Meja Konferensi	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
496	Meja Makan	Mess Potro dan Lembah Asri	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
497	Meja Resepsionis	-	-	Kayu	Pembelian	2010	-	Unit	B	1	-

498	Kursi Pimpinan	-	-	Kayu	Pembelian	2015	-	Unit	B	10	Adipura
499	Kursi Putar	Ovalitinya	-	Besi	Pembelian	2003	-	Unit	B	50	-
500	Kursi Kerja Staf	Indachi D880	-	Besi, Busa	Pembelian	2015	-	Unit	B	18	-
501	Kursi Kerja	Kayada KY 2010	-	Besi, Busa	Pembelian	2016	-	Unit	B	4	-
502	Kursi Tunggu	Chitose KT 02 Cavis 4	-	Besi, Busa	Pembelian	2012	-	Unit	B	10	-
503	Meja 1/2 Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2002	-	Unit	B	1	dr Umum
504	Station Wagon	Toyota Avanza	MHFM1B43J8K700697	Besi	Pembelian	2008	1298 CC	Unit	B	1	AA 9514 TH
505	Station Wagon	Toyota Avanza	MHFM1B43J8K700777	Besi	Pembelian	2008	1298 CC	Unit	B	1	AA 9513 TH
506	Station Wagon	Toyota Avanza	MHKM5EA3JGJ006865	Besi	Pembelian	2016	1298 CC	Unit	B	1	AA 9501 FS
507	Station Wagon	Toyota Avanza	MHKM5EA3JGJ025078	Besi	Pembelian	2016	1298 CC	Unit	B	1	AA 9502 FS
508	Meja Kerja	-	-	Kayu	Hibah	2010	-	Unit	B	10	Ex. Panwaslu
509	Meja Kerja	-	-	Kayu	Pembelian	2012	1/2 Biro	Unit	B	5	-
510	Bus	Hino R 260	MJERK8JSK7JN 10194	Besi	Pembelian	2007	7684 CC	Unit	B	1	AA 9521 AA
511	Sofa Jati	-	-	Jati	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
512	Micro Bus	Mitsubishi Colt Diesel FE 849 BC (4x2) M/T	MHMFE84PBEJ006434	Besi	Pembelian	2014	3908 CC	Unit	B	1	AA 9514 AH
513	Micro Bus	Mitsubishi Colt Diesel FE 849 BC (4x2) M/T	MHMFE84PBEJ006435	Besi	Pembelian	2014	3908 CC	Unit	B	1	AA 9515 AH
514	Pick Up	Suzuki ST 100	MHYESL4105J429571	Besi	Pembelian	2006	970 CC	Unit	B	1	AA 9577 KA
515	Sepeda Motor (BPN)	Astrea Legenda	MH1NFGE1X1K072760	Besi	Pembelian	2001	100 CC	Unit	B	1	AA 9651 AA
516	Sepeda Motor (BPN)	Astrea Legenda	MH1NFGE131K067187	Besi	Pembelian	2001	100 CC	Unit	B	1	AA 9654 AA
517	Sepeda Motor (BPN)	Astrea Legenda	MH1NFGE141K068784	Besi	Pembelian	2001	100 CC	Unit	B	1	AA 9653 AA
518	Gorden	-	-	Kain	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
519	Gorden	-	-	Kain	Pembelian	2013	-	Set	B	1	-
520	Sepeda Motor (BPN)	Astrea Legenda	MH1NFGE192K256444	Besi	Pembelian	2002	100 CC	Unit	B	1	AA 9909 AA
521	Vertical Blind	Ruang Kerja Walikota	-	Kain	Pembelian	2016	-	Set	B	1	-

522	Gorden Semi	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	1.45x0.9m	Unit	B	1	-
523	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x1.75m	Unit	B	1	-
524	Gorden Semi	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	1.70x1.0m	Unit	B	2	-
525	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.05x2.0m	Unit	B	2	-
526	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x0.9m	Unit	B	6	-
527	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x2.3m	Unit	B	3	-
528	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x1.0m	Unit	B	7	-
529	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x2.75m	Unit	B	4	-
530	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x2.0m	Unit	B	8	-
531	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x0.9m	Unit	B	12	-
532	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x1.6m	Unit	B	12	-
533	Karpet	Premium Pearl Legal	-	Kain	Pembelian	2016	89 m2	Unit	B	1	-
534	Karpet	Standar	-	Kain	Pembelian	2016	44 m2	Unit	B	1	-
535	Karpet	Santorini	-	Kain	Pembelian	2016	153.77 m2	Unit	B	1	RK Walikota
536	Karpet	-	-	Kain	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
537	Vacum Cleaner	Lux Kobold EB 360	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
538	Mesin Potong Rumput	Kohler	-	Besi	Pembelian	2007	-	Unit	B	1	-
539	Mesin Pemetong Rumput	Krisbow	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
540	Mesin Pemetong Rumput	Rover Type 14,5 PK 38 Inch	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
541	Mesin Pemetong Rumput	Rover Type 10,5 PK 30 Inch	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
542	Sepeda Motor	Honda Legenda	MH1NFGF153K309415	Besi	Pembelian	2003	110 CC	Unit	B	1	AA 9688 AA
543	AC Stand Floor	LG : 4800	-	Mika	Pembelian	2013	5 PK	Unit	B	4	-
544	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	MHIHB31126K608938	Besi	Pembelian	2006	100 CC	Unit	B	1	AA 9701 BA
545	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	MHIHB31186K608961	Besi	Pembelian	2006	100 CC	Unit	B	1	AA 9702 BA

546	Sepeda Motor	Honda TA 200	MH1KPK1186K001976	Besi	Pembelian	2006	200 CC	Unit	B	1	AA 9703 BA
547	AC Split (2 unit)	LG	-	Mika	Pembelian	2008	1 1/2 PK	Unit	B	2	dr Umum
548	AC	LG S 18	-	Mika	Pembelian	2009	-	Unit	B	1	-
549	AC 2 PK	Daikin	-	Mika	Pembelian	2011	2 PK	Unit	B	1	R. Sidang Lt 1
550	AC	SAMSUNG 09 TUQN	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
551	AC Split	Samsung 09HCFTS	-	Mika	Pembelian	2014	1 PK	Unit	B	1	-
552	AC Split	Daikin RNE 50 MV 14	-	Mika	Pembelian	2015	2 PK	Unit	B	4	2 RS Lt. 1, 2 KDH
553	AC Split	Daikin	-	Mika	Pembelian	2016	1PK	Unit	B	2	-
554	AC Split	Daikin TYPE S TNE 60 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2.5PK	Unit	B	2	-
555	AC Split	Daikin TYPE S TNE 50 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2PK	Unit	B	1	-
556	AC Split	Daikin TYPE S TNE 50 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2PK	Unit	B	3	-
557	Sepeda Motor	Honda	MHIHB6110K256834	Besi	Pembelian	2007	100 CC	Unit	B	1	AA 9815 BA
558	Sepeda Motor	Honda	MHIHB6116K268695	Besi	Pembelian	2007	100 CC	Unit	B	1	AA 9816 BA
559	Wall Fan	Sekai Industrial Fan	-	Alumunium	Pembelian	2013	65 cm	Unit	B	30	-
560	Exhause Fan	-	-	Mika	Pembelian	2009	-	Unit	B	3	dr DKK
561	Exhause Fan	-	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	9	-
562	AC	Greenair	-	Metal	Pembelian	2009	-	Unit	B	3	dr DKK
563	Sepeda Motor	Honda	MHIHB61157K246722	Besi	Pembelian	2007	100 CC	Unit	B	1	AA 9817 BA
564	Kompor Gas	Quantum	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
565	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD MT	MH1JB811XCK835840	Besi	Pembelian	2012	125 CC	Unit	B	1	AA 9857 CA
566	Sepeda Motor (UP3AD)	Honda NF 12A1CF M/T	MH1JBG119CK032804	Besi	Pembelian	2012	125 CC	Unit	B	1	AA 9829 CA
567	Sepeda Motor (UP3AD)	Honda NF 12A1CF M/T	MH1JBG110CK037048	Besi	Pembelian	2012	125 CC	Unit	B	1	AA 9830 CA
568	Almari Besi	Brother	-	Besi	Pembelian	2003	-	Unit	B	5	KPU
569	Lemari Arsip	Yunika	-	Besi	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah

570	Lemari Arsip	Daichi	-	Besi	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
571	Televisi	-	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	1	Ex. Panwaslu
572	Lemari Arsip	Bostinco	-	Besi	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
573	TV LED	Samsung	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
574	Sound System	-	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
575	Sound System	TOA, JBL	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
576	Sound System	-	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
577	Sound System	-	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
578	Sound System	-	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
579	Sound System	-	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
580	Sound System Ruang Adipura	-	-	Mika	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
581	Sound System Lapangan Upacara	-	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
582	Wireless	TOA	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
583	Conference System	Philips	-	Mika	Pembelian	2004	-	Unit	B	1	-
584	Tangga Almunium	-	-	Alumunium	Pembelian	2016	2m	Unit	B	1	-
585	Tangga Almunium	-	-	Alumunium	Pembelian	2016	3m	Unit	B	3	-
586	Filling Kabinet Besi	-	-	Besi	Pembelian	2003	-	Unit	B	6	KPU
587	Papan 10 Program Pokok PKK	-	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
588	White Board	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Besar	Unit	B	1	KPU
589	Dispencer	Denpoo	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
590	White Board	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Kecil	Unit	B	4	KPU
591	Podium	-	-	Kayu	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
592	Podium (2 unit)	-	-	Kayu	Pembelian	2007	-	Unit	B	2	dr Umum
593	Mimbar Upacara	-	-	Kayu	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-

594	LCD*	Toshiba TLP XC-3000	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
595	Layar LCD*	Brite Motorized MV2424	-	Kain, mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	1	Ex. Keu
596	Almari Ukir	-	-	Kayu	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
597	Meja Tamu Wakil Walikota	-	-	Kayu, Kaca	Pembelian	2000	-	Unit	B	1	-
598	Tangga Folding Gate	-	-	Besi	Pembelian	2011	-	Unit	B	4	-
599	Sirine	MS-290 Heles	-	Alumunium	Pembelian	2013	-	Unit	B	2	-
600	DVR CCTV	JMK 9404	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
601	Lampu Hias Taman Setda	-	-	Besi	Pembelian	2015	-	Unit	B	12	-
602	Zice	-	-	Kayu, Spon	Pembelian	2000	-	Unit	B	1	dr Ass II
603	Tandon Air	-	-	Alumunium	Pembelian	2015	1000 L	Unit	B	1	-
604	Tandon Air	-	-	Alumunium	Pembelian	2015	500 L	Unit	B	1	-
605	Lampu Hias	-	-	Besi	Pembelian	2016	2 Lampu	Unit	B	26	-
606	Lampu Hias	-	-	Besi	Pembelian	2016	3 Lampu	Unit	B	14	-
607	Lampu Hias	-	-	Besi	Pembelian	2016	Besar	Unit	B	6	-
608	Water Heater	Modena	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
609	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Sakindo	-	Besi	Pembelian	2014	50 KG	Unit	B	1	-
610	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Sakindo	-	Besi	Pembelian	2014	9 KG	Unit	B	7	-
611	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Yudha Brama Jaya	-	Besi	Pembelian	2014	9 KG	Unit	B	6	-
612	Meja Kursi Tamu	Ligna	-	Kayu	Pembelian	2003	-	Unit	B	1	KPU
613	Zice	-	-	Kayu	Pembelian	2006	-	Unit	B	2	KIB Merah
614	Zice	-	-	Kayu	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
615	Zice (Meja Kursi Tamu)	-	-	Kayu	Pembelian	2007	-	Unit	B	1	Pos Pol Magelang Tengah
616	Zice	-	-	Kayu	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
617	Meja Kursi VIP	Gedung Kyai Sepanjang	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-

618	Tempat Tidur	-	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	5	-
619	Meja Kerja	Ligna	-	Kayu	Pembelian	2003	-	Unit	B	5	KPU
620	Meja Kursi Kerja	Ligna	-	Kayu	Pembelian	2003	-	Unit	B	5	KPU
621	Meja 1/2 Biro	-	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	3	Pos Polisi Magelang Tengah
622	Meja Kerja	-	-	Kayu	Pembelian	2016	1/2 Biro	Unit	B	1	-
623	Almari Pakaian Ukir	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2006	Standar	Unit	B	1	KIB Merah
624	Almari Pakaian	Buatan	-	Plywood	Pembelian	2006	Standar	Unit	B	1	KIB Merah
625	Desktop All in One	HP Pro One 400 G2	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
626	PC All in One	ASUS Bussines Pro A4320	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
627	Almari Pakaian Ukir	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
628	Laptop	Acer	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	1	-
629	Almari Pakaian Besar	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2006	3 Pintu	Unit	B	1	KIB Merah
630	Laptop	Dell Vostro 3300	-	Mika	Pembelian	2010	-	Unit	B	1	-
631	Almari Pakaian	Buatan	-	Kayu	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
632	Gorden	-	-	Kain	Pembelian	2009	485 M	Unit	B	1	-
633	Gorden	Gedung Kyai Sepanjang	-	Kain	Pembelian	2014	-	Set	B	1	-
634	Kulkas	Toshiba	-	Besi	Pembelian	2006	-	Unit	B	1	KIB Merah
635	Notebook	Asus P450LDV-WO209D	-	Mika	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
636	AC Stand Floor	Changhong	-	Mika	Pembelian	2013	5 PK	Unit	B	2	KIB Merah
637	AC Stand Floor	Daikin Standing Floor FV	-	Mika	Pembelian	2015	5 PK	Unit	B	4	GKS
638	AC Stand Floor	Daikin Standing Floor FV-100L	-	Mika	Pembelian	2015	5 PK	Unit	B	3	GKS
639	Notebook	Asus Bussines Pro P2420LJ (Core i5-5200U VGA) Black	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
640	Notebook	Dell Inspiron 14	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
641	Notebook	Dell Bussines Vostro 14	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-

642	Notebook	Lenovo Thinkpad M4180	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
643	Notebook	Asus Pro P4410JF Core i5	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
644	Notebook	LENOVO Business ThinkPad Edge E460 Q3ID	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
645	Notebook	LENOVO IdeaPad IP500	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
646	Notebook	ASUS Bussines Pro A4320	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
647	Notebook	ASUS Bussines Pro A4320	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
648	Notebook	Lenovo Business Thinkpad	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
649	Smartphone	Asus Zenfone MAX 2/32 Black	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
650	Tablet	Samsung Galaxy Tab A with S Pen	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
651	Kipas Angin	Panasonic	-	Mika	Hibah	2010	-	Unit	B	1	Umum
652	Wall Fan	Panasonic	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	2	-
653	Kompur Gas	Quantum	-	Alumunium	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
654	Monitor 17"	Phillips	-	Mika	Pembelian	2011	-	Unit	B	2	-
655	Monitor LED	Samsung	-	Mika	Pembelian	2012	23"	Unit	B	1	-
656	Monitor LED	Samsung	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
657	Tabung LPG	-	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	3	-
658	Televisi	Toshiba	-	Mika	Pembelian	2003	-	Unit	B	1	KPU
659	Televisi	Toshiba	-	Mika	Pembelian	2006	21"	Unit	RR	12	LP
660	Printer	HP Laserjet P1006	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	2	KIB Merah
661	Televisi	Sony	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
662	Printer	HP Laserjet 1536dnfMFP	-	Mika	Pembelian	2011	-	Unit	B	1	-
663	Printer Inkjet	Epson L200	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
664	Televisi	Sharp Alexander Slim II	-	Mika	Pembelian	2009	21"	Unit	B	1	-
665	Televisi	Sharp Alexander Slim II	-	Mika	Pembelian	2009	29"	Unit	B	1	-

666	Dispencer	National	-	Mika	Pembelian	2003	-	Unit	B	1	KPU
667	Dispencer	Uchida	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	1	KIB Merah
668	Dispencer	Sanken	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
669	Handycam	Toshiba	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	1	Polresta
670	Printer	Epson L220	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
671	Printer	CANON MF621Cn	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
672	Printer	Brother MFC-J3720	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
673	Printer	HP Laserjet Pro P1102	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
674	Printer	Brother MC-J200	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
675	Kamera	Sony	-	Mika	Pembelian	2003	-	Unit	B	1	KPU
676	Scanner	Epson Perfection [V370]	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
677	Scanner	Scanner Plustek OpticSlim 1180	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
678	Hard Disk External	Seagate Backup Plus Slim USB 3.0	-	Mika	Pembelian	2016	1 TB	Unit	B	-	-
679	Lighting Gedung Kyai Sepanjang	-	-	Besi	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
680	Komputer PC Type A (2 unit)	Intel Pentium IV	-	Mika	Pembelian	2003	-	Unit	RB	2	KPU
681	Komputer PC*	Acer Power FH	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	1	-
682	UPS	FSP UPS EP FP600	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
683	UPS	APC BR550GI	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
684	Komputer Type A (2 unit)	-	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	B	2	Pengadilan Negeri
685	Komputer (3 unit)	-	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	3	Polsek Magelang Tengah
686	Kursi Kerja Eselon III	Indachi D660	-	Besi, Busa	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
687	Komputer (7 unit)	Relion Ares 17"	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	7	SPM (2 unit - 24.275.000) PN (4 unit - 48.550.000) Polresta (1 unit -
688	Lensa Kamera	Canon EF 135mm f/2L USM	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
689	Komputer (7 unit)	Relion Ares 19"	-	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	7	Kodim

690	Laptop*	Toshiba Satellite A 105	-	Mika	Pembelian	2006	-	Unit	KB	2	-
691	Notebook	Toshiba M300-E416	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	RB	1	Pengadilan Negeri
692	Parabola & Antena	-	-	Mika	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
693	Parabola & Antena	-	-	Mika	Pembelian	2002	-	Unit	B	1	-
694	Parabola	Matrix Burger	-	Besi	Pembelian	2014	-	Unit	B	2	-
695	Notebook	HP Probook 4430s	-	Mika	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
696	Notebook	Acer Aspire V5 471 323B2G50M	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
697	Notebook	Toshiba L735-1128U	-	Mika	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
698	Printer	HP Business Inkjet	Kodim (7 unit - 10.622.500) SPM (2 unit - 3.035.000) PN (4 unit - 6.070.000)	Mika	Pembelian	2007	-	Unit	B	14	-
699	Kursi Kerja Walikota	Yubi	-	Besi, Busa	Pembelian	2011	-	Unit	B	1	-
700	Handy Talky	Olinca	-	Mika	Pembelian	2008	-	Unit	B	24	Perlengkapan (12 unit - 15.162.000), Polres (10 unit - 12.635.000)
701	Faximile	Toshiba	-	Mika	Pembelian	2003	-	Unit	B	1	KPU
702	Gedung B	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
703	Gedung KPU	Jl. P. Diponegoro	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
704	Gedung C - Eks DPPKD	Bangunan - 1.800.000.000, rehab ruang th. 2007 - 34.897.000, rehab KM dan ruang rapat th. 2008 - 84.477.000	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	Pembangunan Th. 2014
705	Gedung Kas	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
706	Gedung A - Setda	Bangunan - 7.425.000.000, rehab gedung th. 2008 - 36.475.000, ruang kerja walikota th. 2005 - 86.600.000	rehab void fiber glass th. 2007 - 91.000.000, rehab pagar th. 2007 - 87.154.000	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	ii
707	Ruang NOC	Gedung C - Eks DPPKD	-	Kayu	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
708	Rehab Ruang Sidang Lantai 1	Gedung C - Eks DPPKD	-	Asbes	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
709	Perbaikan dan Penyekatan	Gedung C - Eks DPPKD	-	Kayu	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
710	Teralis dan Daun Pintu	Jl. Pahlawan No. 87 dan No. 89	-	Besi, Kayu	Pembelian	2001	P	Unit	B	-	iv
711	Pagar Keliling Tanah	-	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
712	Gerbang Rumdin KDH	-	-	Besi	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
713	Pagar	Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	-	Besi	Pembelian	2004	-	Unit	B	1	-

714	Pavingisasi Halaman Belakang	-	-	Beton	Pembelian	2012	937,347 m ²	Unit	B	-	ii
715	Renovasi Pagar/Talud	Jl. Cempaka	-	Beton	Pembelian	2012	P	Unit	B	-	iii
716	Renovasi Interior Ruang Kerja KDH	-	-	Kayu	Pembelian	2012	-	Unit	B	-	ii
717	Etalase MCC	-	-	Kaca	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
718	Taman Depan Garasi VIP	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2014	116 m ²	Unit	B	1	-
719	Gedung Kantor KONI	Jl. Letjen Suprpto	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
720	Gudang Farmasi	Bangunan DKK	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	-	-
721	Gudang KPU	Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	-	Beton	Pembelian	2001	246 m ²	Unit	RR	1	-
722	Gudang	Jurangombo	-	Beton	Pembelian	2014	256 m ²	Unit	B	-	-
723	Gudang / Garasi	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	-	-
724	Gudang / Garasi	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
725	Mushola Sekretariat	-	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	Bangunan th. 1985 - 150.000.000, perbaikan th. 2005 - 85.933.000
726	Masjid	-	-	Beton	Pembelian	2015	P	Unit	B	1	Kamar Mandi (2016)
727	Kantor Kec. Magelang Utara Lama	Jl. A. Yani 135 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
728	Gedung D - Wiworo Wiji Pinilih	Bangunan th. 2005 - 472.950.000 Bangunan (1.350m) - 1.350.000.000 panggung kesenian th. 2002 - 10.000.000	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
729	Pengadilan Agama	Jl. Kahendran	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
730	Mushola Gedung Wanita	Jl. Veteran	-	Beton	Pembelian	2012	P	Unit	B	-	i
731	Kantor Polisi	(Kw. Kerkof) Gedung th. 2002 - 319.872.450,	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
732	Rehab Atap	Gedung D - Wiworo Wiji Pinilih	-	Beton	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
733	Rehab Kamar Mandi	Gedung D - Wiworo Wiji Pinilih	-	Beton	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
734	Gedung Eks. Tidar Theater	Jl. A. Yani, Kel. Panjang	-	Beton	Pembelian	2011	644,525 m ²	Unit	RB	-	-
735	Gedung Eks. Magelang Theater	Jl. A. Yani, Kel. Panjang	-	Beton	Pembelian	2011	1.319,965 m ²	Unit	RB	-	-
736	Gedung Garbha Parama Artha	Jl. Tidar No. 11 (BPR)	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
737	Gedung PDAM	Jl. Veteran	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-

738	Kantin	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
739	Gudang Farmasi	Bangunan DKK	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
740	Balai Pelajar	Jl. Pahlawan No. 74	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	RB	1	-
741	Gedung Wanita	Jl. Veteran	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	i
742	Mushola Gedung Wanita	Jl. Veteran	-	Beton	Pembelian	2012	P	Unit	B	-	i
743	Ex SD Potrobangsas 5	Kel. Potrobangsas 1	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
744	Kios	Sub. Terminal Sambung	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	RB	-	SK Hapus Sekda
745	Gedung Perpustakaan	Jl. Sunan Gunung Jati III	-	Beton	Pembelian	2001	180 m2	Unit	B	1	-
746	Kantor	Jl. DI Panjaitan No. 15	-	Beton	Pembelian	2001	200 m2	Unit	B	1	-
747	Workshop	Jl. Alibasyah Sentot	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
748	Garasi	Rumdin KDH	-	Beton	Pembelian	2014	72 m2	Unit	B	1	-
749	Sekolah	Jl. Sukorini No. 47 - Ex SD Cacaban 2	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
750	Garasi VIP	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
751	TK Negeri Pembina	Sanden, Kramat Magelang	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
752	Bangunan Gedung/Garasi Pool Semi Permanen (Parkir, dll)	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	SP	Unit	B	1	-
753	Bangunan Tempat Genset	Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
754	Gladiol/ Fasilitas Publik	Jl. Panembahan Senopati	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
755	Lapangan Tenis	Jl. Kartini	-	Beton	Pembelian	2001	SP	Unit	B	1	-
756	Pertokoan dan Kios	Jl. A. Yani, Kel. Panjang	-	Beton	Pembelian	2011	144 m2	Unit	RB	1	-
757	Pos Polisi & Halte Bus	-	-	Beton	Pembelian	2001	SP	Unit	B	1	-
758	Pagar Belakang Kantor Setda	Jl. Jend Sarwo Edi W No 2	-	Beton	Pembelian	2014	291 m	Unit	B	1	-
759	Gerbang	Jl. Jend Sarwo Edi W No 2	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	Pos Jaga
760	Pintu Gerbang DPRD	Jl. Jend Sarwo Edi W No 2	-	Beton	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
761	Lapangan Upacara	Jl. Jend Sarwo Edi W No 2	-	Beton	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-

762	Rumdin Wakil Walikota Mgl	Jl. P. Diponegoro Magelang	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
763	Doorloop Pendopo	Jl. Cempaka	-	Beton, Kayu	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
764	Garasi Pendopo	Jl. Cempaka	-	Besi	Pembelian	2015	P	Unit	B	-	-
765	Rumah Dinas	Jl. Sunan Kalijogo VII No. 14 RT 01 RW 04 Jurangombo Selatan	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	90 m2
766	Ruang 3x5	Rumdin Sekda	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	-	-
767	Rumah Dinas	Jl. Pangeran Diponegoro No. 108	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
768	Garasi Kantor Satlantas	Jl. Ikhlas	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
769	Garasi Gedung Kyai Sepanjang	Jl. Kartini	-	Beton	Pembelian	2014	178 m2	Unit	B	1	-
770	Gedung Garasi / Pool SP (Pasar Kecamatan Magelang Selatan)	Jl. Letjen Suprpto	-	Beton	Pembelian	2001	SP	Unit	B	1	-
771	Rumdin Sekda	Jl. Pahlawan No. 87 dan No. 89	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	iv
772	Perpustakaan Desa Buku	Taman Kyai langgeng	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
773	Pusat Informasi Desa Buku	Taman Kyai langgeng	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
774	UPTD Percetakan	Jl. Sudirman	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
775	Pagar Gedung Kyai Sepanjang	Jl. Kartini	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
776	Mess Mawar	Jl. P. Diponegoro	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
777	Mess Cempaka	Jl. Cempaka	Rumah Dinas (760 m2), Aula (224 m2),	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	Mushola, Kanopi, Tempat Wudhu
778	Prasasti Pendopo	Rumdin KDH	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
779	Jalan, Jl. Sidotopo	-	-	Aspal	Pembelian	2001	2.700m	Unit	B	-	Hibah Untidar
780	Jalan Sidotopo	-	-	Aspal	Pembelian	2014	367.5m	Unit	B	-	Hibah Untidar
781	Jalan Sidotopo, Kel. Kedungsari	-	-	Aspal	Pembelian	2009	920m	Unit	B	-	Hibah Untidar
782	Tanggul Selokan	-	-	Beton, Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
783	Rumdin Kecamatan Utara Lama	Jl. A. Yani 282 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
784	Tower Air Gedung Wiworo	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	24.75	Unit	B	1	-
785	Menara dan Tandon Air (Rumdin KDH)	Jl. Cempaka	-	Beton	Pembelian	2012	P	Unit	B	-	iii

786	Sumur Resapan	Kyai Sepanjang (4), Wiworo (2), Setda (2)	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	8	-
787	Bangunan Gorong-Gorong	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
788	Bangunan Gorong-Gorong	Pas batu belah - 22.47m ² , pas paving - 179.72m ² , pas kansteen - 147.90m ² , pas paving - 107.84m ² , pas kansteen - 58.60m ² , pas paving - 332.57m ² .	-	Beton	Pembelian	2001	179.72	Unit	B	1	-
789	Bangunan Gorong-Gorong	Pas batu belah - 114.85m ² , pas paving natural - 156,40m ²	-	Beton	Pembelian	2001	271,25	Unit	B	1	-
790	Rehab Gorong-gorong	Sidotopo, Kel. Kedungsari	-	Beton	Pembelian	2012	19,27.5,7	Unit	B	-	Hibah Untidar
791	Teralis Selokan	-	-	Beton	Pembelian	2012	-	Unit	RR	2	ii
792	Instalasi Tiang Listrik	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Besi	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
793	Penataan Instalasi Listrik	Mess Cempaka	-	Kabel	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
794	Instalasi Lampu Taman Setda	Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Mgl	-	Besi	Pembelian	2010	-	Unit	B	1	-
795	Rumdin DKK / Kantor Panwaslu	Jl. Pahlawan No. 110	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
796	Rumdin Kepala DPU	Jl. Pahlawan No. 108	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	Dari DPU
797	Instalasi Listrik Rumdin KDH	Jl. Cempaka No. 3 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
798	Mess DPRD	Lembah Asri	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
799	Instalasi Listrik Kantor Setda	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
800	Instalasi Genset	-	-	Kabel	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
801	Panel Listrik	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Besi	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
802	Mess Pemkot	Jl. Pahlawan No. 106	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
803	Instalasi Tata suara (Gedung Eks DPPKD)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
804	Instalasi Fire Alarm (Gedung Eks DPPKD)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	-	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
805	Instalasi Pengkondisian Udara (Gedung Eks DPPKD)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	-	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
806	Jaringan Pembawa Air Minum	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
807	Mess Pemkot	Jl. Pahlawan No. 86	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
808	Konstruksi Jaringan Air Minum	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
809	Jaringan Listrik Lain-Lain (Kantor Sekretariat)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-

810	Jaringan Listrik	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Beton	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
811	Jaringan Listrik Lain-Lain (Gedung B, C dan D)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2001	-	Unit	B	1	-
812	Jaringan Listrik	Penambahan Daya	-	Kabel	Pembelian	2010	16.500 VA	Unit	B	1	-
813	Jaringan Listrik	Penambahan Daya	Rumdin Sekda	Kabel	Pembelian	2011	2.200 VA	Unit	B	1	-
814	Jaringan Listrik	Penambahan Daya	Rumdin Wakil Walikota	Kabel	Pembelian	2012	-	Unit	B	1	-
815	Mess Cipta Karya	Jl. T. Pelajar	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
816	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Jl. Tidar Sawe RW. XIV & Kiringan Kel. Tidar	-	Beton	Pembelian	2001	P	Unit	B	1	-
817	Instalasi Listrik Gedung E (DPPKD)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
818	Penambahan Daya Gedung A	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
819	Instalasi Listrik Setda (Tambah Daya)	Gedung A Setda	-	Besi	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
820	Jaringan Listrik (Penambahan daya)	Rumdin WKDH	-	Kabel	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
821	Jaringan Listrik (Penambahan daya)	Rumdin WKDH	-	Kabel	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
822	Instalasi Listrik Gedung E (DPPKD)	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
823	Instalasi Listrik Gedung Eks DPPKD	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
824	Instalasi Listrik GKS	Gedung Kyai Sepanjang	-	Kabel	Pembelian	2015	-	Unit	B	1	-
825	Jaringan Pembawa Air Minum	Rumdin Sunan Kalijaga	-	Beton	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
826	Instalasi Listrik	Rumdin Sunan Kalijaga	-	Besi	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
827	Jaringan Listrik Rumdin	Jl. Sunan Kalijaga	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
828	Penambahan Daya Gedung E	Jl. Sarwo Edi W. No. 2 Mgl	-	Kabel	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
829	Jaringan Listrik (Penambahan daya)	Mess Cipta Karya	-	Kabel	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
830	Jaringan Listrik (Penambahan daya)	Gedung Kyai Sepanjang	-	Kabel	Pembelian	2016	-	Unit	B	1	-
831	Meja Tennis Meja	Powerspin 208	-	Kayu	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
832	Taman Sekretariat	Jl. Jend. Sarwo Edhi W No.2	-	Tanaman	Pembelian	2013	-	Unit	B	1	-
833	DED Komplek Pertokoan Rejomulyo	-	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-

834	DED Gedung PKK	-	-	Beton	Pembelian	2014	-	Unit	B	1	-
835	Gorden Semi	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	1.45x0.9m	Unit	B	-	-
836	Kompore Gas	Quantum	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
837	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x1.75m	Unit	B	-	-
838	UPS	FSP UPS EP FP600	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
839	Gorden Semi	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	1.70x1.0m	Unit	B	-	-
840	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.05x2.0m	Unit	B	-	-
841	Dispencer	Sanken	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
842	Printer	Epson L220	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
843	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x0.9m	Unit	B	-	-
844	Kamera	Sony Alpha A6000	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
845	Notebook	Dell Inspiron 14	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
846	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x2.3m	Unit	B	-	-
847	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x1.0m	Unit	B	-	-
848	Notebook	Dell Bussines Vostro 14	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
849	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x2.75m	Unit	B	-	-
850	Printer	Brother MFC-J3720	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
851	Lensa Kamera	Canon EF 135mm f/2L USM	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
852	AC Split	Daikin	-	Mika	Pembelian	2016	1PK	Unit	B	-	-
853	Pompa	Tsurumi	-	Besi	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
854	TV LED	Samsung	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
855	Gorden	Onna Heavy Duty Seri 52	-	Kain	Pembelian	2016	2.65x2.0m	Unit	B	-	-
856	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x0.9m	Unit	B	-	-
857	AC Split	Daikin TYPE S TNE 60 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2.5PK	Unit	B	-	-

858	AC Split	Daikin TYPE S TNE 50 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2PK	Unit	B	-	-
859	Notebook	LENOVO IdeaPad IP500	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
860	AC Split	Daikin TYPE S TNE 50 MV	-	Mika	Pembelian	2016	2PK	Unit	B	-	-
861	Gorden Full	Model Spanyol	-	Kain	Pembelian	2016	2.3x1.6m	Unit	B	-	-
862	Notebook	ASUS Bussines Pro A4320	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
863	Tablet	Samsung Galaxy Tab A with S Pen	-	Mika	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
864	Instalasi Genset	-	-	Kabel	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
865	Karpet	-	-	Kain	Pembelian	2016	-	Unit	B	-	-
										1.185	

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2017, BPKAD mempunyai alokasi anggaran Belanja sebesar Rp 22.812.511.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8.103.020.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.709.491.000

Selanjutnya realisasi APBD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2011-2016 sebagaimana Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Perkembangan Realisasi APBD DPPKD Kota Magelang
Tahun 2011-2016

No	Tahun	Anggaran			
		Belanja Tidak Langsung Rp	Belanja Langsung Rp	Total Rp	Tingkat Serapan (%)
1	2011	4.714.280.563	4.265.029.782	8.979.310.345	88,55
2	2012	5.087.003.756	6.040.822.503	11.127.826.259	81,55
3	2013	4.816.933.610	6.920.553.716	11.737.487.328	83,56
4	2014	5.381.361.505	8.382.831.395	13.764.192.900	86,87
5	2015	5.491.472.827	8.787.610.642	14.279.083.469	83,32
6	2016	5.768.041.609	10.456.476.008	16.224.517.617	88,82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada posisi diatas 80,00%, sehingga dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam kategori tinggi.

Selanjutnya selain mengelola belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengemban tugas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Adapun gambaran pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun sebagaimana tabel-tabel berikut:

Tabel 2.8
 Anggaran Pendapatan yang dikelola DPPKD Kota Magelang
 Tahun 2011 - 2016

No	Tahun	Sumber Pendapatan (Rp)			Total Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
		Pajak daerah	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah			
1	2011	7.659.760.000	1.085.389.000	6.049.000.000	14.794.149.000	16.120.726.516	108,97
2	2012	8.464.256.000	1.348.055.000	4.645.353.000	14.457.664.000	21.416.363.604	148,13
3	2013	14.032.404.000	1.831.718.000	5.000.000.000	20.864.122.000	29.128.241.080	139,61
4	2014	16.116.700.000	1.348.055.000	5.977.059.000	23.441.814.000	35.064.447.982	149,58
5	2015	20.423.275.000	6.766.592.000	7.708.000.000	34.897.867.000	46.163.929.719	132,28
6	2016	23.587.802.000	6.294.110.000	7.708.000.000	37.589.912.000	44.694.364.245	118,89

Selanjutnya sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan daerah, maka fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Adapun besaran anggaran yang dikelola sebagai PPKD beserta realisasinya selama kurun waktu 6 (enam) tahun diuraikan dalam Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
 Belanja Tidak Langsung, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Pembiayaan
 Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	40,071,415,000	13,874,095,000	34.62	21,062,419,000	8,776,466,300	41.67	26,835,114,000	8,955,672,800	33.37	7,925,174,000	7,102,135,400	89.61	15,415,735,000	11,035,175,600	71.58
	Belanja Hibah	6,182,285,000	5,960,866,000	96.42	6,644,607,000	6,354,208,000	95.63	5,353,382,000	5,257,082,000	98.20	3,905,285,000	3,716,500,000	95.17	11,779,107,000	9,688,650,000	82.25
	Belanja Bantuan Sosial	31,500,000,000	6,769,465,200	21.49	1,148,382,000	1,135,382,000	98.87	3,846,058,000	2,974,558,000	77.34	3,519,835,000	2,885,585,000	81.98	3,075,925,000	866,950,000	28.19
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	500,000,000	456,727,800	91.35	500,000,000	456,727,800	91.35	500,000,000	456,727,800	91.35	500,054,000	500,050,400	100.00	560,703,000	479,575,600	85.53
	Belanja Tidak Terduga	1,889,130,000	687,036,000	36.37	12,769,430,000	830,148,500	6.50	17,135,674,000	267,305,000	1.56	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Tidak Terduga										27,227,542,000	106,022,000	0.39	42,010,354,000	1,066,915,000	2.54
	Belanja Tidak Terduga										27,227,542,000	106,022,000	0.39	42,010,354,000	1,066,915,000	2.54

3	Belanja pembiayaan	2,447,000,000	2,447,000,000	100.00	6,369,000,000	6,369,000,000	100.00	6,648,000,000	6,648,000,000	100.00	7,615,136,000	7,615,136,000	100.00	6,534,000,000	6,534,000,000	100.00
	Pembentukan dana cadangan	-	-	0.00	3,000,000,000	3,000,000,000	0.00	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00	-	-	0.00
	Penyertaan Modal	2,447,000,000	2,447,000,000	0.00	3,369,000,000	3,369,000,000	0.00	4,648,000,000	4,648,000,000	0.00	5,615,136,000	5,615,136,000	0.00	6,534,000,000	6,534,000,000	0.00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	Pemberian Dana Bergulir	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam sub bab ini digambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Bagian Perlengkapan Setda Kota Magelang, sebagai bahan bagi BPKAD dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Untuk mengukur kinerja pelayanan selama tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tingkat pencapaian beberapa indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja RPJMD Kota Magelang Tahun 2010-2015.
2. Indikator Kinerja Renstra DPPKD Tahun 2010-2015.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kota Magelang Tahun 2011-2015.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015 dilihat berdasarkan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut :

- Indikator kinerja RPJMD Kota Magelang Tahun 2010-2015

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja RPJMD yang menjadi tanggungjawab DPPKD selama masa periode 2010-2015, tersaji dalam table 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kota Magelang
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Nilai Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ditetapkannya perda APBD tepat waktu	tepat	Tdk tepat	tepat	tepat	tepat
2.	Jumlah dan macam pajak daerah	10	10	10	10	10
3.	Jumlah dan macam retribusi daerah	3	3	3	3	3

- Indikator Kinerja Renstra DPPKD Tahun 2010-2015

Untuk mengukur capaian kinerja Renstra DPPKD Tahun 2010-2015, dapat dilihat melalui capaian setiap misi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersaji pada Tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.11
Tingkat Pencapaian Misi DPPKD
Tahun 2011-2015

No	MISI	Nilai Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mewujudkan aparatur pengelola keuangan yang professional, akuntabel dan transparan	100	100	100	100	100
2.	Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100	100
3.	Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah	100	100	100	100	100

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kota Magelang Tahun 2011-2015
Capaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12
Target Renstra, Realisasi Capaian dan Rasio Capaian DPPKD
Tahun 2011-2015

No.	Indikator	SPM	IKK/IKU	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rasio Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Ditetapkannya Perda APBD tepat Waktu		V	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah dan macam pajak		V	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86
5	Jumlah dan macam retribusi daerah		V	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rasio PAD terhadap APBD		V	11.49%	12.72%	13.00%	15.09%	16.40%	11.76%	14.08%	14.54%	20.00%	20.04%	102.35	110.69	111.85	132.54	122.20

Jika dilakukan penghitungan rata-rata sampai dengan akhir tahun 2015 maka interpretasi terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan dalam tabel 2.11 tersebut diperoleh data sebagai berikut:

1. Indikator yang Tercapai

Indikator yang tercapai sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu:

- Rasio pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan capaian kinerja 100%
- Tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan dengan capaian kinerja 100%
- Jumlah dan macam pajak dengan capaian kinerja 142,86%

Adapun macam pajak daerah serta dasar hukum pemungutannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- b. Pajak Restoran, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- c. Pajak Restoran, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - d. Pajak Hiburan, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - e. Pajak Reklame, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - f. Pajak Penerangan Jalan, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - g. Pajak Parkir, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - h. Pajak Air Tanah, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Jumlah dan macam retribusi daerah dengan capaian kinerja 100%
- Adapun macam retribusi daerah serta dasar hukum pemungutannya adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - Retribusi pelayanan kesehatan
 - Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - Retribusi pelayanan parker tepi jalan umum
 - Retribusi pelayanan pasar
 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
 - Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
 - Retribusi Pengendalian menara Telkom

- b. Retribusi Jasa Usaha, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi tempat khusus parkir
 - Retribusi rumah potong hewan
 - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, terdiri dari:
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Gangguan
 - Retribusi Izin Trayek
- Rasio PAD terhadap APBD dengan capaian kinerja 115,92%

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011 -2016 sebagaimana tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Rasio Target Dan Realisasi PAD Terhadap APBD Kota Magelang
Tahun 2011 – 2016

TAHUN	APBD	PAD			
		TARGET	RASIO (%)	REALISASI	RASIO (%)
2011	540,631,928,000	62,100,129,000	11.49%	63,557,701,976	11.76%
2012	648,401,128,000	82,457,388,000	12.72%	91,314,601,697	14.08%
2013	740,755,689,000	96,302,877,000	13.00%	107,739,838,961	14.54%
2014	824,554,107,000	124,432,498,000	15.09%	164,927,631,230	20.00%
2015	931,636,159,000	152,805,995,000	16.40%	186,677,410,081	20.04%

2. Indikator yang Tidak Tercapai

Indikator yang tidak tercapai sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu:

- Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu dengan capaian kinerja 80,00%

Adapun Penetapan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak dapat ditetapkan tepat waktu

adalah Penetapan Perda Kota Magelang Nomor 3 tahun 2012 Tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan tanggal 18 Januari 2012.

Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat ditetapkan tepat waktu selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2010;
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2013 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013;
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2014.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja BPKAD Kota Magelang serta analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan Pemerintah Kota Magelang.
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan dalam hal perpajakan semakin tinggi sehingga dibutuhkan sumber daya personil, inovasi dalam pelayanan serta sarana pendukung yang memadai.
- c. Penguatan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan secara keseluruhan dari tahap perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan tahap pencairan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban/realisasi anggaran Kota Magelang.
- d. Seringnya terjadi perubahan berbagai aturan ketentuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi tentang pengelolaan keuangan daerah.
- e. Penguatan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain tantangan yang dihadapi, BPKAD juga memiliki peluang dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan pelayanan kedepannya yaitu:

- a. Penguatan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan pembangunan Kota Magelang dengan menggali potensi-potensi pendapatan.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang baik untuk :
 - dasar penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendapatan yang bersumber dari pemerintah maupun dari provinsi.
 - dasar pelaksanaan penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
 - dasar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- c. Adanya komitmen pimpinan daerah untuk :
 - terus mengembangkan Kota Magelang sehingga sumber-sumber pendapatan asli daerah meningkat seiring dengan semakin banyaknya investasi yang ditanamkan di Kota Magelang.
 - melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal perencanaan penganggaran, diwajibkan oleh pimpinan bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh lain adalah terkait dengan pertanggungjawaban APBD selalu didorong untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
 - responsive terhadap ketentuan-ketentuan baru.
- d. Adanya kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah.
- e. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi semakin tinggi.
- f. Masih terdapat potensi sumber-sumber pendapatan yang dapat digali.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan di Kota Magelang yang perlu ditangani pada periode tahun 2016-2021 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD diuraikan sebagai berikut:

- Masih dijumpainya penentuan target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi oleh unit penghasil masih menggunakan pendekatan *incremental based budgeting*, yang mestinta target berdasarkan potensi riil. Untuk itu study potensi retribusi menjadi kebutuhan dan dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel khususnya Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengguna Kas (Bank) masih menggunakan system konvensional, sehingga diperlukan pengembangan system layanan secara online.
- Dalam rangka meningkatkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan upaya penilaian kembali/penilaian secara rutin terhadap obyek PBB. Selain itu dalam rangka menghindari terjadinya *potensial lost* terhadap pendapatan.
- Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan atas terbitnya Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah belum terbit, sehingga sampai dengan saat ini masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang lama dimana sudah banyak yang tidak sesuai dengan UU. Salah satu yang urgent untuk dilaksanakan penyesuaian adalah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Belum sinkronnya antara peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut dana transfer daerah dengan penyusunan APBD sehingga terjadi ketidakselarasan dalam proses penganggaran.

- Dalam rangka mewujudkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sangat diperlukan langkah-langkah konkrit terutama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pengelolaan barang milik daerah, diperlukan pembinaan dan diklat kepada pengelola barang serta sosialisasi tentang aturan pengelolaan BMD terutama dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dalam rangka menjamin sinkronisasi perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, diharapkan adanya koneksitas antara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) dengan Sistem Informasi Keuangan daerah (SIMDA).
- Bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian data asset tetap dalam neraca dengan laporan pengurus barang SKPD. Sehingga diperlukan rekonsiliasi antara penyusun laporan keuangan dengan penyimpan barang dan pengurus barang.
- Belum sepenuhnya Law Enforcement dijalankan, yaitu berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayarannya.
- Belum adanya peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan nilai pasar.
- Data piutang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang kurang valid sehingga diperlukan verifikasi dan validasi ulang.
- Belum optimalnya penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran.
- Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD belum sama dan belum memadai.
- Pencairan anggaran belum sesuai dengan aliran kas sehingga terjadi penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV.
- Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan SKPD atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- Aset tetap belum tersaji secara lengkap;
- Masih terdapat kepemilikan tanah yang belum disertiikatkan atas nama Pemerintah Kota Magelang;
- Tindak lanjut hasil sensus barang belum optimal;
- Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengurus dan Penyimpan barang) untuk mengelola barang milik daerah masih perlu ditingkatkan;
- Belum adanya sistem yang terintegrasi antara pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah sehingga data yang tersajikan dapat menjadi informasi yang sama dan bisa diyakini kebenarannya;
- Rekonsiliasi antara pengelola barang dan pengelola keuangan harus dilakukan secara rutin atau berkala untuk memperoleh keakuratan data sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan;
- Pengurus barang di sekolah sekolah SD masih dirangkap oleh guru, bahkan terkadang hanya dikerjakan guru honorer;
- Masih terbatasnya sumber daya manusia pengurus dan penyimpan barang baik kuantitas maupun kualitasnya di Perangkat Daerah yang memiliki aset besar yang berakibat dalam penyajian Laporan Pengelolaan Aset dan Barang menjadi tidak bisa diyakini

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam RPJMD adalah "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS". Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

1. Kota Jasa

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Kota Modern

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik: (a) Masyarakat sejahtera dalam financial; (b) Kota terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum); (c) Visual kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

3. Kota Cerdas

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas: (1) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

4. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui: (1) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) Menciptakan peluang kerja dalam bidang

pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

5. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, BPKAD bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi kota jasa yang modern dan cerdas, dengan mendukung Misi 1 *"Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan*

kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat " dengan fokus pada Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal, dengan program pembangunan : Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan indikator : Persentase kenaikan PAD.

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :

- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

Tujuan 3 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan

Sasaran 5 : Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :

- Derajat Otonomi Fiskal
- Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Selanjutnya Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah *"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi"*, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk mewujudkannya. Adapun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi pengelolaan keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkannya dengan menetapkan visi SKPD, yaitu *"Menjadi badan yang transparan dan akuntabel didukung oleh pelayanan prima dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna"*. Misi yang disusun untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain

8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah

Analisis terhadap visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang berkualitas.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan visi Provinsi Jawa Tengah dengan *menetapkan* visi SKPD, yaitu " *Menjadi Institusi Terdepan dalam Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat secara Profesional dan Akuntabel Guna Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari*". Dengan Misi :

1. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, konitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hokum, otonomi daerah dan kerjasama secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.
2. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian dan produksi daerah yang semakin tertib, stabil dan mantap.
3. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, kehumasan, keuangan dan umum secara transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar *stakeholder*.

Berdasarkan *Renstra* Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, *Renstra* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah serta *Renstra* Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun permasalahan dan sasaran yang dihadapi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Sinkronisasi prioritas pembangunan DPPKD Kota Magelang dengan prioritas Direktorat Jendral Keuangan Daerah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Dimensi Pembangunan dan Prioritas Renstra Dirjen Keuangan Daerah Tahun 2014-2019	Sasaran Pokok Prioritas Renstra DPPKD Kota Magelang Tahun 2016-2021	Sasaran Pokok Prioritas Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018	Sasaran Pokok Prioritas Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1. Terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang berbasis kinerja 2. Terciptanya penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan 3. Tersedianya laporan keuangan yang berkualitas	1. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan pemerintah secara efektif dan efisien yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	
	1. Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah		1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ruang daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang daerah.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang daerah.
3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis daerah.

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Sejahtera Kota Magelang dalam RPJMD tahun 2016-2021 adalah permasalahan pada lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, yaitu:

1. Belum terpenuhinya RTH publik sehingga perlu optimalisasi lahan terbuka yang sudah ada seperti makam dan sempadan sungai;
2. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industry, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha;
3. Keterbatasan lahan sehingga perlu ada upaya minimalisasi sampah dengan kampung organik dan 3R untuk memaksimalkan usia TPA.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah tersebut, sebagai unsur pelaksana teknis penunjang, BPKAD tidak secara langsung memiliki kebijakan yang relevan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang daerah dimaksud.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengoptimalan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah disampaikan pada Bab III, BPKAD mendukung untuk mewujudkan unsur kota jasa modern dan cerdas, melalui Misi 1. Merujuk pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kota Magelang, disusun sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra
BPKAD
Tahun 2016 -2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	1. Derajat ekonomi fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Rasio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah	1. Penerapan SAB dalam proses penganggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	efektif dan efisien	yang berbasis kinerja							
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September
3.	Mewujudkan penatausahaan keuangasn yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5
4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	2. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
			3. Persetujuan Perda	Juni s/d	Juni s/d	Juni s/d	Juni s/d	Juni s/d	Juni s/d

			Pertanggungjawaban APBD	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli
5.	Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	55%	60%	70%	100%	100%	100%
			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	70%	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk menyamakan persepsi tentang pengukuran indikator kinerja yang digunakan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016-2021 maka berikut ini kami sampaikan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja tersebut :

1. Derajat ekonomi fiskal
Definisi Operasional : Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat
Definisi Operasional : PAD dibagi Dana Perimbangan ditambah Dana Provinsi
3. Rasio pajak daerah terhadap PAD
Definisi Operasional : Realisasi Pajak Daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
4. Rasio retribusi daerah terhadap PAD
Definisi Operasional : Realisasi Retribusi Daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
5. Prosentase pertumbuhan PAD
Definisi Operasional : $(\text{Realisasi PAD tahun } n - \text{realisasi PAD tahun } n-1) / \text{realisasi PAD tahun } n-1$
6. Penerapan SAB dalam proses penganggaran
Definisi Operasional : Penggunaan Atandar Analisa Belanja dalam proses penyusunan anggaran
7. Persetujuan Raperda tentang APBD
Definisi Operasional : Waktu penetapan Perda tentang APBD sesuai ketentuan
8. Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan
Definisi Operasional : Waktu penetapan Perda tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan
9. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung
Definisi Operasional : Jumlah pengajuan permohonan surat pencairan dana dibandingkan dengan jumlah terbitnya surat perintah pencairan dana
10. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan
Definisi Operasional : Tersedianya Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP
Definisi Operasional : Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah.
12. Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD
Definisi Operasional : Waktu penetapan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan
13. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang
Definisi Operasional : Jumlah bidang tanah tercantum dalam neraca yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah bidang tanah dalam neraca.
14. Barang Milik Daerah yang didayagunakan
Definisi Operasional : Jumlah barang milik daerah tercantum dalam neraca yang didayagunakan dibandingkan dengan jumlah barang milik daerah dalam neraca.
15. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu
Definisi Operasional : Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan barang milik daerah semesteran tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah.
16. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu
Definisi Operasional : Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan barang milik daerah tahunan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah perangkat daerah.

B. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh BPKAD melalui Rencana Strategis Tahun 2016-2021, maka BPKAD menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi mempertimbangkan faktor internal dan eksternal BPKAD berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab III Renstra ini. Faktor internal ditunjukkan dengan faktor-faktor

Strength (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan), sedangkan faktor eksternal di tunjukkan dengan faktor-faktor *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman).

Berikut disampaikan *faktor internal*:

1. *Strength* (kekuatan)

a. Dasar hukum yang kuat

Keberadaan BPKAD secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan dasar hukum tersebut tugas pokok BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Responsif terhadap perubahan kebijakan

Perubahan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, selama ini cukup cepat direspon untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

c. Kewenangan koordinasi

Adanya kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

d. Komitmen pimpinan

- Adanya komitmen pimpinan daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung kekuatan pembiayaan pembangunan daerah.
- Adanya komitmen dari unsur pimpinan untuk dapat melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Adanya komitmen dari pimpinan untuk terus berupaya mewujudkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain dalam hal:
 - Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) terintegrasi dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah.
 - Pemanfaatan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).
 - Penerapan Sistem Pajak Online dalam pelayanan pajak daerah.
 - Pemanfaatan Sistem Informasi Barang Milik Daerah terintegrasi dari proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah sampai dengan pelaporan barang milik daerah.
- f. Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

2. *Weakness (kelemahan)*

- a. Keterbatasan kemampuan dan jumlah aparatur
Salah satu kelemahan yang dialami oleh organisasi birokrasi adalah masih rendahnya kualitas SDM aparatur. Kompetensi individu sebagian aparatur belum sesuai/tepat dengan kebutuhan.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan system pengelolaan keuangan daerah.
- c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.

Sedangkan *factor eksternal* yaitu:

1. *Opportunity (peluang)*

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang jelas
 - Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban, telah memiliki pedoman-pedoman teknis sehingga dalam pelaksanaan masing-masing unsure pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik.

- Dalam pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan seluruh proses pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah memiliki ketentuan yang jelas.
 - Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah telah diatur secara jelas batas-batas kewenangan daerah, sehingga membuka peluang untuk mengoptimalkan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan daerah.
- b. Hubungan yang dinamis dengan perangkat daerah
- Bahwa perangkat daerah sebagai pelaksana dari sistem pengelolaan keuangan telah secara aktif membina hubungan secara timbal balik dengan BPKAD sebagai pengampu tugas fungsi pengelola keuangan daerah.
- c. Dukungan dari instansi terkait
- BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait demi terwujudnya pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan yang efektif. Koordinasi tersebut antara lain dengan berbagai unsure pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah, antara lain perbankan, Badan Pertanahan Nasional, serta instansi vertical lainnya yang ada di Kota Magelang.
- d. Dukungan partisipasi komponen masyarakat
- Adanya hubungan kerjasama yang baik dengan stake holder terkait pengelolaan pendapatan daerah, antara lain Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Magelang
 - Disamping dukungan dari instansi pemerintah daerah maupun instansi lainnya, dukungan masyarakat sangat penting, dalam hal ini utamanya adalah adanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

2. *Threat (ancaman)*

- a. Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan public seiring dengan perkembangan teknologi.

Adapun perumusan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal BPKAD sebagaimana disampaikan diatas. Berikut tabel analisisnya:

Tabel 4.3
Faktor Eksternal dan Internal, Alternatif Strategi
pada BPKAD
Tahun 2016 -2021

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundangan yang jelas 2. Dukungan partisipasi komponen masyarakat 	<p>Tantangan (<i>Threat</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi
<p>Kekuatan (<i>Strength</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum yang kuat 2. Responsif terhadap perubahan kebijakan 3. Kewenangan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi kebijakan pengelolaan Pendapatan asli daerah 2. Penyediaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Penganggaran dalam penyusunan anggaran 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah 2. Penggunaan sistem yang up to date dalam proses penyusunan anggaran 3. Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah yang up to date
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kemampuan dan jumlah aparatur 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan system pengelolaan keuangan daerah 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan/pemahaman pengelola keuangan daerah

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan BPKAD dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Renstra
BPKAD
Tahun 2016 -2021

VISI Daerah : "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS"									
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.									
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan		Program	
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1	Tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah	1	Penguatan regulasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1	Penyusunan regulasi yang jelas tentang sumber-sumber PAD sesuai ketentuan yang berlaku	Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				2	Menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah	1	Membangun sistem pengelolaan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				3	Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka terealisasinya dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.	1	Pemanfaatan sistem yang tersedia dan komunikasi dengan instansi terkait	Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

2	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1	Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1	Penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Penganggaran dalam penyusunan anggaran	1	Penetapan Analisa Standar Biaya Pemerintah Kota Magelang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1	Penggunaan dan Pengembangan sistem informasi dalam proses penyusunan anggaran	1	Terus melakukan penyempurnaan sistem penganggaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				2	Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah	1	Pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) dalam proses penyusunan anggaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	1	Terciptanya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Penyediaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mengikuti perkembangan/perubahan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

		2	Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1	Pemrosesan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	Penyusunan standar operasional prosedur pencairan dana	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1	Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang up to date	1	Penggunaan sistem secara on line di seluruh perangkat daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				1	Peningkatan pengetahuan/pemahaman pengelola keuangan perangkat daerah	1	Melaksanakan pembinaan kepada pengelola keuangan perangkat daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang optimal	1	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	1	Penguatan regulasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1	Penyusunan regulasi yang jelas tentang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

				2	Penggunaan dan Pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan barang milik daerah	1	Terus melakukan penyempurnaan sistem informasi barang milik daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				2	Peningkatan pengetahuan/pemahaman pengelola barang	1	Melaksanakan pembinaan kepada pengelola barang milik daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Mewujudkan sistem kerja yang professional dan didukung sumber daya manusia, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan yang berkualitas	1	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	1	Pengiriman personil untuk mengikuti diklat/bintek	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		3	Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah dan PPKD yang dapat dipertanggungjawabkan	1	Menyusun standar operasional tentang pengelolaan keuangan perangkat daerah dan PPKD	1	Penunjukan pengelola keuangan yang kompeten	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada BAB IV. akan dijabarkan dengan penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2016-2021. Indikasi rencana program dalam Renstra BPKAD Kota Magelang Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta program pendukung untuk pemenuhan layanan BPKAD Kota Magelang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahunnya dan pada akhir periode perencanaan disertai pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut disampaikan rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Magelang untuk lima tahun kedepan dalam tabel 5.1.

TABEL 5.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
				Derajat ekonomi fiskal												
				Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat												
				Rasio pajak daerah terhadap PAD												
				Rasio retribusi daerah terhadap PAD												
				Prosentase pertumbuhan PAD												
			Kegiatan :													
			Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan Terdatanya Tertib Administrasi Laporan	12 laporan	121.848.000	100%	127.950.000	100%	134.350.000	100%	141.050.000	100%	148.100.000	100%	155.500.000
			Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Peraturan daerah												
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	4 lap	288.350.000	4 lap	302.767.500	4 lap	317.905.875	4 lap	333.801.169	4 lap	350.491.227	4 lap	350.491.227
			Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Jumlah dana dan Laporan Potensi subjek dan Objek pajak	2 lap	33.295.000	2 lap	36.624.500	2 lap	40.286.950	2 lap	44.315.645	2 lap	48.747.210	2 lap	48.747.210
			Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Jumlah dana dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PBB	12 lap	50.094.000	12 lap	55.103.400	12 lap	60.613.740	12 lap	66.675.114	12 lap	73.342.625	12 lap	73.342.625
			Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	12 lap	150.800.000	12 lap	165.880.000	12 lap	182.468.000	12 lap	200.714.800	12 lap	220.786.280	12 lap	220.786.280
			Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah dana dan Data Tunggakan Pajak daerah	120 WP	117.538.000	120 WP	129.291.800	120 WP	142.220.980	120 WP	156.443.078	120 WP	172.087.386	120 WP	172.087.386
			Intensifikasi Pemungutan PBB	tercapainya target penerimaan PBB-P2, pelaksanaan PBB-P2 Panutan, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT, Wajib pajak	4 kegiatan	297.798.000	4 kegiatan	327.577.800	4 kegiatan	360.335.580	4 kegiatan	396.369.138	4 kegiatan	436.006.052	4 kegiatan	479.606.657
			Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	Tertib Administrasi PBB-P2	28 Laporan	227.230.000	28 Laporan	249.953.000	28 Laporan	274.948.300	28 Laporan	302.443.130	28 Laporan	332.687.443	28 Laporan	365.956.187
			Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan PAT	12 lap	51.700.000	12 lap	56.870.000	12 lap	62.557.000	12 lap	68.812.700	12 lap	75.693.970	12 lap	75.693.970
			Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	12 bulan	892.569.000	12 bulan	426.325.900	12 bulan	468.958.490	12 bulan	515.854.339	12 bulan	567.439.773	12 bulan	624.183.750
			Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Dokumen Reklame dan Penempatan	12 lap	52.749.000	12 lap	58.023.900	12 lap	63.826.290	12 lap	70.208.919	12 lap	77.229.811	12 lap	77.229.811
			Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data Piutang PBB-P2 yang valid	6 bulan	406.413.000	6 bulan	310.654.300	6 bulan	341.719.730	6 bulan	375.891.703	6 bulan	413.480.873	6 bulan	454.828.961
			Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli daerah	12 lap	115.525.000	12 lap	121.301.250	12 lap	127.366.313	12 lap	133.734.628	12 lap	140.421.360	12 lap	140.421.360

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dana dan Jumlah WP Yang di Audit	20 lap	48.157.000	20 lap	52.972.700	20 lap	58.269.970	20 lap	64.096.967	20 lap	70.506.664	20 lap	70.506.664	
			Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	Laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan													
			Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	100 OP	267.046.000	100 OP	293.750.600	100 OP	323.125.660	100 OP	355.438.226	100 OP	390.982.049	100 OP	430.080.253	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Jumlah peserta yang tersosialisasi													
			Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Jumlah dana dan Pajak daerah	50 SK	63.516.000	50 SK	69.867.600	50 SK	76.854.360	50 SK	84.539.796	50 SK	92.993.776	50 SK	92.993.776	
			Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Intensifikasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah													
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah raperda tentang pengalangan barang milik daerah	100%	114.690.000	0%										
2	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
				Penerapan SAB dalam proses penganggaran													
				Kegiatan :													
				Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Buku Analisis Standar Belanja	3 dokumen	120.597.000	3 dokumen	144.716.400	3 dokumen	173.659.680	3 dokumen	208.391.616	3 dokumen	250.069.939	3 dokumen	300.083.927
		Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah		Persetujuan Raperda tentang APBD													
				Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan													
				Kegiatan :													
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya nota keuangan, Raperda dan Perda Itg APBD	4 dokumen	418.089.000	4 dokumen	501.706.800	4 dokumen	602.048.160	4 dokumen	722.457.792	4 dokumen	866.949.350	4 dokumen	1.040.339.220
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya 2 Raperwal dan Perwal tentang penjabaran APBD	24390000000%	243.900.000	3 dokumen	292.680.000	3 dokumen	351.216.000	3 dokumen	421.459.200	3 dokumen	505.751.040	3 dokumen	606.901.248
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya nota keuangan, Raperda dan Perda Itg perubahan APBD	4 dokumen	354.081.000	4 dokumen	424.897.200	4 dokumen	509.876.640	4 dokumen	611.851.968	4 dokumen	734.222.362	4 dokumen	881.066.834
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya 2 Raperwal dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD	4 dokumen	350.293.000	4 dokumen	420.351.600	4 dokumen	504.421.920	4 dokumen	605.306.304	4 dokumen	726.367.565	4 dokumen	871.641.078
				Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA dan Dokumen KUA	2 dokumen	225.629.000	2 dokumen	270.754.800	2 dokumen	324.905.760	2 dokumen	389.886.912	2 dokumen	467.864.294	2 dokumen	561.437.153
				Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS dan Dokumen PPAS	2 dokumen	95.597.000	2 dokumen	114.716.400	2 dokumen	137.659.680	2 dokumen	165.191.616	2 dokumen	198.229.939	2 dokumen	237.875.927
				Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA perubahan dan Dokumen KUA perubahan	2 dokumen	194.990.000	2 dokumen	233.988.000	2 dokumen	280.785.600	2 dokumen	336.942.720	2 dokumen	404.331.264	2 dokumen	485.197.517
				Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS perubahan dan Dokumen PPAS perubahan	2 dokumen	90.288.000	2 dokumen	108.345.600	2 dokumen	130.014.720	2 dokumen	156.017.664	2 dokumen	187.221.197	2 dokumen	224.665.436
				Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	DPA SKPD yang diteliti	48 SKPD	47.708.000	48 SKPD	57.249.600	48 SKPD	68.699.520	48 SKPD	82.439.424	48 SKPD	98.927.309	48 SKPD	118.712.771
				Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA SKPD	48 SKPD	46.485.000	48 SKPD	55.782.000	48 SKPD	66.938.400	48 SKPD	80.326.080	48 SKPD	96.391.296	48 SKPD	115.669.555

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2016		2017		2018		2019		2020		2021	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			Kegiatan :													
			Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah SKPD yang tertib Pengelolaan BMD per jumlah SKPD	12 bulan	156.311.000	12 bulan	167.253.000	12 bulan	178.961.000	12 bulan	191.489.000	12 bulan	204.894.000	12 bulan	219.237.000
			Penghapusan Aset	Jumlah barang yang dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapus per total jumlah barang	1 kegiatan	114.690.000	0%	-		-		-		-		-
			Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Jumlah petugas Pengelola BMD yang memahami Peraturan BMD per jumlah semua petugas Pengelola BMD	3 kegiatan	354.400.000	3 kegiatan	379.208.000	3 kegiatan	405.753.000	3 kegiatan	434.156.000	3 kegiatan	464.547.000	3 kegiatan	497.066.000
			Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jenis laproan pengelolaan barang milik daerah yang disusun	6 laporan	43.231.000	600%	46.258.000	600%	49.497.000	600%	52.962.000	600%	56.670.000	600%	60.637.000
			Penjualan aset daerah	Jumlah barang yang dijual / jumlah barang yang akan dihapus jumlah barang	1 kegiatan	71.832.000	100%	76.861.000	100%	82.242.000	100%	87.999.000	100%	94.159.000	100%	100.751.000
			Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan alau bangunan	jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan	4 kegiatan	74.048.000	400%	79.232.000	400%	84.779.000	400%	90.714.000	400%	97.064.000	400%	103.859.000
			Penyelamatan aset daerah	jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah	12 kegiatan	204.390.000	1200%	218.698.000	1200%	234.007.000	1200%	250.388.000	1200%	267.916.000	1200%	286.671.000
			Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir	4 kegiatan	39.099.000	400%	41.836.000	400%	44.765.000	400%	47.899.000	400%	51.252.000	400%	54.840.000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah													
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah													
			Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan													
			Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah barang yang digunakan dan dimanfaatkan per total jumlah barang	300%	77.402.000	300%	82.821.000	300%	88.619.000	300%	94.823.000	300%	101.461.000	300%	108.564.000
			Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Jumlah barang yang terkuasai per total jumlah BMD	100%	37.924.000	100%	40.579.000	100%	43.420.000	100%	46.460.000	100%	49.713.000	100%	53.193.000
			Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	pelaksanaan proses pensertifikatan aset tanah pemerintah Kota Magelang	12 bidang	336.727.000	12 bidang	360.298.000	12 bidang	385.519.000	12 bidang	412.506.000	12 bidang	441.382.000	12 bidang	472.279.000
			Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik pemerintah kota	1 kegiatan	88.162.000	100%	94.334.000	100%	100.938.000	100%	108.004.000	100%	115.565.000	100%	123.655.000
			Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Pemda	jumlah bidang tanah milik pemkotayang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya	2 bidang	12.250.000	200%	13.108.000	200%	14.026.000	200%	15.008.000	200%	16.059.000	200%	17.184.000

BAB VI
 INDIKATOR KINERJA BPKAD
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis BPKAD tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021, perangkat daerah ikut bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Demikian pula dengan BPKAD, bertanggungjawab khususnya terhadap pencapaian Misi 1 dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
 Indikator Kinerja Awal Periode RPJMD dan Target Capaian 5 Tahun Mendatang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Transisi 2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%	35,62%
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Pusat dan Dana Provinsi	45,41%	27,22%	35,92%	43,55%	48,25%	52,77%	57,11%	57,11%
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra BPKAD Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan Renstra ini digunakan sebagai acuan bagi perangkat daerah yang baru untuk melaksanakan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Magelang yang telah ditetapkan.

Renstra BPKAD ini berisi gambaran kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2016. Renstra BPKAD berisi proyeksi terhadap kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya disertai dengan pengakomodasian perkembangan kebutuhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru yang harus dilaksanakan serta isu-isu strategis/permasalahan yang harus ditindaklanjuti.

A. Program Transisi

Sebagaimana Renstra DPPKD, pada perubahan Renstra ini juga mengakomodir program transisi. Program transisi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan pada periode selanjutnya terutama pada tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru. Oleh karena itu dengan berakhirnya RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 nantinya, maka pada tahun pertama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota yang baru penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kegiatan dan Anggaran di setiap perangkat daerah juga tetap mengacu pada renstra masing-masing perangkat daerah 2016-2021.

Oleh karena itu pada masa transisi, prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD diarahkan kepada:

1. Upaya penyelesaian permasalahan yang sifatnya mendesak.
2. Pelaksanaan program utama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
3. Pelaksanaan program utama dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
4. Penanganan terhadap pemecahan permasalahan yang belum terselesaikan pada periode Renstra sebelumnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra BPKAD Kota Magelang pada dasarnya merupakan perencanaan strategis selama kurun waktu lima tahun, sehingga penyusunan Renstra BPKAD 2016-2021 sudah disesuaikan dengan kebutuhan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra BPKAD, bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang.

Berdasar hal tersebut, kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Rencana Strategis BPKAD merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pejabat di BPKAD dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan. Seluruh jajaran pejabat di BPKAD berkewajiban menjaga konsistensi dalam penyusunan rencana kerja tahunan dengan berpedoman pada Renstra.
2. Renstra dan Renja BPKAD harus dievaluasi secara periodik sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.

Magelang, Januari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MAGELANG



LARSITA, SE, MSc
Pembina Tk. I
NIP. 19661202 199003 1 008